



LKjIP TAHUN 2021



PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

Jalan Soekarno Hatta No. 7 Padang Panjang

☎ 0752-82208

✉ pnpp_kls2@yahoo.co.id

🌐 www.pn-padangpanjang.go.id

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Pengadilan Negeri Padang Panjang telah dapat menyusun laporan setiap tahun yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagai salah satu pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berisi informasi mengenai capaian kerja yang diukur dengan cara membandingkan antara realisasi pelaksanaan program/kegiatan dengan target yang telah direncanakan pada tahun 2021.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Padang Panjang ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan laporan ini di masa yang akan datang.

Padang Panjang, 01 Februari 2022
PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
KETUA



DADI SURYANDI, S.H., M.H.
NIP. 19790915 200212 1 005

IKHTIAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Padang Panjang Tahun 2021 ini disusun. LKjIP menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Padang Panjang selama tahun 2021, yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi, walaupun Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 telah mensyaratkan setiap instansi pemerintah menyusun suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), namun laporan ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan Analisis dan Evaluasi Kinerja dalam rangka Peningkatan Kinerja Organisasi secara menyeluruh.

LKjIP tahun 2021 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Padang Panjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan visi, Visi Pengadilan Negeri Padang Panjang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG “

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GRAFIK	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A Latar Belakang	6
B Kedudukan, Wewenang dan Fungsi	7
C Sistematika Laporan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024	18
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021	23
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2021	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	27
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021	47
BAB IV PENUTUP	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2021	10
Tabel 1.2 Pengajuan Banding Tahun 2021	10
Tabel 1.3 Pengajuan Kasasi Tahun 2021	10
Tabel 1.4 Permasalahan pada Pengadilan Negeri Padang Panjang	13
Tabel 2.1 Reviu Indikator Kinerja Utama	16
Tabel 2.2 Matriks Hubungan Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Reviu Indikator Utama	20
Tabel 2.3 Reviu Rencana Strategis 2020-2024	22
Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	23
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahunan 2021	25
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2021	28
Tabel 3.2 Sasaran 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	30
Tabel 3.3 Keadaan sisa perkara perdata yang harus diselesaikan	32
Tabel 3.4 Matriks keadaan perkara perdata Tahun 2021	22
Tabel 3.5 Indikator Kinerja Sasaran 1.a	32
Tabel 3.6 Keadaan sisa perkara pidana yang harus diselesaikan	33
Tabel 3.7 Matriks keadaan perkara pidana Tahun 2021	34
Tabel 3.8 Indikator Kinerja Sasaran 1.b	34
Tabel 3.9 Keadaan Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	35
Tabel 3.10 Indikator Kinerja Sasaran 1.c	36
Tabel 3.11 Rincian perkara putus perdata tahun 2021	36
Tabel 3.12 Keadaan perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	37
Tabel 3.13 Indikator Kinerja Sasaran 1.d	38
Tabel 3.14 Rincian putusan perkara pidana tahun 2021	38
Tabel 3.15 Rincian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.....	39
Tabel 3.16 Indikator Kinerja Sasaran 1.e	39
Tabel 3.17 Rincian perkara yang tidak mengajukan banding	40
Tabel 3.18 Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	41
Tabel 3.19 Indikator Kinerja Sasaran 1.f	41
Tabel 3.20 Rincian putusan yang tidak mengajukan kasasi	42
Tabel 3.21 Putusan perkara yang tidak mengajukan upaya PK	43
Tabel 3.22 Indikator Kinerja Sasaran 1.g	43
Tabel 3.23 Rincian perkara yang tidak mengajukan PK	43
Tabel 3.24 Perkara pidana anak yang dilakukan diversi	45
Tabel 3.25 Indikator Kinerja Sasaran 1.h	45
Tabel 3.26 Persentase Survey Kepuasan Masyarakat	47
Tabel 3.27 Indikator Kinerja Sasaran 1.i	47
Tabel 3.28 Sasaran 2.Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	48
Tabel 3.29 Jumlah putusan perkara perdata yang dikirim tepat waktu	50
Tabel 3.30 Indikator Kinerja Sasaran 2.a	50
Tabel 3.31 Rincian putusan perkara perdata yang dikirim tepat waktu	51
Tabel 3.32 Jumlah putusan perkara pidana yang dikirim tepat waktu	52
Tabel 3.33 Indikator Kinerja Sasaran 2.b	52
Tabel 3.34 Rincian putusan perkara pidana yang dikirim tepat waktu	52
Tabel 3.35 Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	54
Tabel 3.36 Indikator Kinerja Sasaran 2.c	54
Tabel 3.37 Persentase berkas perkara yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	56

Tabel 3.38 Indikator Kinerja Sasaran 2.d	56
Tabel 3.39 Jumlah putusan perkara Tipikor	58
Tabel 3.40 Indikator Kinerja Sasaran 3	59
Tabel 3.41 Jumlah Perkara Prodeo	59
Tabel 3.42 Indikator Kinerja Sasaran 3.a	60
Tabel 3.43 Jumlah perkara di luar gedung Pengadilan	61
Tabel 3.44 Indikator Kinerja Sasaran 3.b	61
Tabel 3.45 Jumlah pencari keadilan	62
Tabel 3.46 Indikator Kinerja Sasaran 3.c	62
Tabel 3.47 Indikator Kinerja Sasaran 4	64
Tabel 3.48 Jumlah Eksekusi	64
Tabel 3.49 Indikator Kinerja Sasaran 4.a	65
Tabel 3.50 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2021	67
Tabel 3.51 Rincian Pelaksanaan Belanja Pegawai Tahun 2021	67
Tabel 3.52 Rincian Pelaksanaan Belanja Barang Operasional Tahun 2021	68
Tabel 3.53 Rincian Pelaksanaan Belanja Modal Tahun 2021	69
Tabel 3.54 Realisasi Anggaran belanja DIPA (03) Badan Peradilan Umum .	69
Tabel 3.55 Rincian Pelaksanaan Anggaran Badilum Tahun 2021	69

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	31
Grafik 2. Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan	33
Grafik 3. Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan .	34
Grafik 4. Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	36
Grafik 5. Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	38
Grafik 6. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	40
Grafik 7. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	42
Grafik 8. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	44
Grafik 9. Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi	45
Garfik 10. Sasaran 2	49
Grafik 11. Sasaran 2.a	50
Grafik 12. Sasaran 2.b	53
Grafik 13. Sasaran 2.c	54
Grafik 14. Sasaran 2.d	56
Grafik 15. Sasaran 3	59
Grafik 16. Indikator Kinerja Sasaran 3.c	62
Grafik 17. Indikator Kinerja Sasaran 4.a	64
Grafik 18. Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2021	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi (Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pengadilan Negeri Padang Panjang selaku Satuan Kerja Peradilan Tingkat pertama memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Permen tersebut dinyatakan bahwa Satuan Kerja Peradilan Tingkat Pertama dan unit kerja mandiri Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Padang Panjang tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2021, dalam rangka mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2021, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tahun mendatang.

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Padang Panjang, merupakan Pengadilan Negeri yang Dulunya Merupakan Bagian dari Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Pada Tanggal 7 April 1977 Nomor 32/131/2-22, dikeluarkan Sebuah Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Negeri Padang Panjang dan di tambah dua daerah hukum yaitu Kecamatan Batipuh dan Kecamatan X Koto, tetapi setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan, kedua Kecamatan tersebut dikembalikan ke Wilayah Hukum Tanah Datar. Pada tahun 2018 terbit Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kelas, Hukum dan daerah Hukum Pengadilan tingkat Pertamadan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan, maka Kecamatan Batipuh dan Kecamatan X Koto kembali ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang.

Pengadilan Negeri Padang Panjang merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.

Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam administrasi Kepaniteraan dan administrasi Sekretariat, hal mana dimaksudkan selain menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Wewenang dan Tugas Pokok Pengadilan Negeri Tingkat Pertama menurut Undang-undang adalah sebagai berikut :

- **Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama**
(Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).
- ❑ **Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.**
(Pasal 52 Ayat (1) Undang- Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).
- ❑ **Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.** *(Pasal 52 Ayat (2) Undang- Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang -Undang No. 49 Tahun 2009).*

Fungsi Pengadilan Negeri Tingkat Pertama adalah sebagai berikut :

- **Fungsi Mengadili (Judicial Power)**, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
- **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
- **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita, dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum.
- **Fungsi Nasihat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- **Fungsi Administrasi**, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Selain hal diatas, sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan agenda pembaharuannya, maka ada empat aspek strategis yang menjadi perhatian di Pengadilan Negeri Padang Panjang, yaitu:

1. Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Upaya untuk meningkatkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan. Salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian

perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah maksimal 5 bulan. Dalam pelaksanaannya pada tahun 2021 kecepatan penyelesaian perkara mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 (lima) bulan khususnya untuk perkara perdata gugatan.

Tabel 1.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu 2021

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan	Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu
2019	Pidana	109	102	93.58%
	Perdata	3	2	66,67%
2020	Pidana	83	83	100%
	Perdata	11	6	50%
2021	Pidana	78	78	100%
	Perdata	11	10	91%

Tabel 1.2 Pengajuan Banding Tahun 2021

Tahun	Perkara	Perkara Putus	Perkara banding	Persentase jumlah perkara yang mengajukan Banding
2020	Pidana	83	2	2%
	Perdata	6	5	83%
2021	Pidana	78	8	10%
	Perdata	11	4	36%

Tabel 1.3 Pengajuan Kasasi Tahun 2021

Tahun	Perkara	Putusan Banding	Perkara Kasasi	Persentase jumlah perkara yang mengajukan Kasasi
2020	Pidana	3	2	75%
	Perdata	4	3	75%
2021	Pidana	8	3	38%
	Perdata	4	2	50%

2. Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Efektiviitas pengelolaan penyelesaian perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus dan dieksekusi serta pemberitahuan kepada para pihak secara tepat waktu. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa : proses itu berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (*legal certainly*), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah: faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan teknologi informasi. Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP. Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan.

3. Akses Terhadap Pengadilan

Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di pengadilan dan masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan merupakan salah satu masalah yang terus berusaha dipecahkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya.

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan

- a. Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan.
- b. Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010

tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarjinalkan, yaitu:

1. Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan.
2. Pemberian bantuan jasa advokat.

Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Negeri Padang Panjang telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan. Namun pemberian akses informasi tersebut masih mendapat keluhan dari publik karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan.

4. Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Tingkat kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan dapat dilihat dari jumlah Putusan Perkara Perdata yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) yang dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi) telah dilaksanakan atau ditindaklanjuti (dieksekusi).

Terlepas dari hal tersebut diatas, ada beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna penegakkan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang meliputi;

Tabel 1.4 Permasalahan pada Pengadilan Negeri Padang Panjang

NO	URAIAN	POTENSI	PERMASALAHAN
1	Penyelesaian Perkara	1. SEMA No 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 2. Standar operasional prosedur Pengadilan Negeri Padang Panjang.	1. Masih ada perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 (lima) bulan. 2. Masih rendahnya keberhasilan mediasi dalam proses perkara perdata
2	Akses terhadap pengadilan	1. Akses pengadilan terhadap masyarakat miskin dan termarjinalkan melalui Posbakum, dan Prodeo. 2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. 3. Akses informasi menggunakan sarana meja informasi dan teknologi informasi. 4. SK Ketua Mahkamah Agung No. 144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan	1. Tidak adanya anggaran untuk menyediakan fasilitas prodeo 2. Tidak tersedianya anggaran untuk fasilitas zitting plaats

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran tugas, fungsi dan wewenang Pengadilan Negeri Padang Panjang.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana kinerja tahun 2021 Pengadilan Negeri Padang Panjang memuat angka target kinerja tahun 2021 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini bertujuan untuk merancang dan menyusun penganggaran untuk tahun berikutnya, yang diaplikasikan dengan Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL). Pengadilan Negeri Padang Panjang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Padang Panjang. Adapun indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tabel 2.1 Reviu Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	Perbandingan antara sisa perkara perdata yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	Perbandingan antara sisa perkara perdata yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan Jumlah perkara perdata yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan Jumlah perkara perdata yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Perbandingan jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara diputus	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Perbandingan jumlah perkara yang tidak diajukan hukum kasasi dengan jumlah perkara yang telah diputus	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	Perbandingan antara persentase perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah perkara yang telah diputus	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan

		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dengan jumlah perkara pidana anak	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	Perbandingan jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan jumlah responden pencari keadilan	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
2	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diputus	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Persentase jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Perbandingan antara jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Perbandingan jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan

			waktu 1 hari setelah putus dengan jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat		
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

A. Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Padang Panjang Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

A.1 Visi dan Misi

VISI adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Padang. Visi Pengadilan Negeri Padang Panjang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu:

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG YANG AGUNG"

Melalui visi ini menjadikan Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagai lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Visi Pengadilan Negeri Padang Panjang merujuk pada TAP MPR Nomor 7/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan dan Visi Mahkamah Agung yang berhasil dirumuskan pada 10 September 2009.

MISI adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan Pengadilan Negeri Padang Panjang dapat terlaksana dan terwujud dengan baik Untuk memperjelas upaya pencapaian visi tersebut, Pengadilan Negeri Padang Panjang menurunkannya dalam 4 (empat) pilar misi – yang diuraikan pada bagian berikutnya:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Padang Panjang;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Padang Panjang;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Padang Panjang;

A.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Padang Panjang seperti termuat dalam rencana strategis adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan;
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan;
3. Kepercayaan Publik;

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2020-2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini:

Tabel 2.2 Matrik Hubungan Tujuan Strategis, Sasaran Strategis
Dan Reviu Indikator Utama

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIIKATOR KINERJA UTAMA
1. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan c. Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu d. Persentase perkara Pidana dan pidana yang diselesaikan tepat waktu e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi i. Indeks kepuasan pencari keadilan

2. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan	2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
3. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan	3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
4. Kepercayaan Publik	4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Tabel 2.3 Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Padang Panjang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	80%	80%	80%	80%	80%
		d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	80%	80%	100%	100%	100%
		e. Persentase perkara yang tidak menagjukan upaya hukum Banding	70%	70%	70%	70%	70%
		f. Persentase perkara yang tidak menagjukan upaya hukum Kasasi	60%	60%	80%	80%	80%
		g. Persentase perkara yang tidak menagjukan upaya hukum PK	60%	60%	90%	90%	90%
		h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	50%	50%	20%	20%	20%
		i. Indeks kepuasan pencari keadilan	80%	80%	90%	90%	90%
	2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30%	30%	20%	20%	20%
		d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara elngkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	90%	100%	100%	100%	100%
	3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0%	0%	0%	0%	0%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	d. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	50%	50%	50%	50%

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021 merupakan proses penetapan target kinerja tahun 2021 berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun sebelumnya. Penetapan target kinerja ini diikuti juga dengan penetapan program dan kegiatan beserta target pelaksanaan dan kerangka pendanaannya. Penyusunan RKT ini bertujuan untuk merancang dan menyusun penganggaran untuk tahun berikutnya, yang diaplikasikan dengan Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL).

Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Padang Panjang
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	80%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	60%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	60%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	30%
		Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%

		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%

C. Perjanjian Kinerja Tahunan 2021

Perjanjian kinerja ini bertujuan sebagai komitmen bersama untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai tolak ukur dan dasar penilaian evaluasi kinerja serta dasar penetapan sasaran kinerja pegawai. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2021 antara Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	100%
		b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	80%
		d. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	80%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	70%
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	60%
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	60%
		h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	50%
		i. Indeks kepuasan pencari keadilan	80%
2	Peningkatan Akseibilitas Putusan Hakim	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase salinan putusan pidana perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30%
		d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%

	Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%

Anggaran

Dipa 01 : Rp. 4.225.925.000,- (empat milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dipa 03 : Rp. 47.716.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2021

Capaian Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Secara keseluruhan capaian kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang tahun 2021 dinyatakan “berhasil”, karena rata-rata capaian sebesar 124% (seratus dua puluh empat persen), dimana terdapat 13 (tiga belas) dari 18 (delapan belas) indikator memperoleh capaian $\geq 100\%$ serta 3 (tiga) indikator tidak dapat dinilai karena tidak ada ataupun tidak terdapat kegiatan indikator tersebut pada Pengadilan Negeri Padang

Panjang. Ketidak berhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan terjadi karena beberapa faktor , antara lain :

1. Banyaknya perkara masuk pada akhir tahun sedangkan batas waktu penyelesaian perkara sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 adalah 3 bulan untuk perkara pidana dan 5 bulan untuk perkara perdata, sehingga perkara-perkara tersebut menjadi tunggakan atau sisa pada tahun berjalan.
2. Jenis perkara perdata gugatan berupa tanah dan harta pusaka, sehingga jarang para pihak yang mau berdamai, sehingga penyelesaian perkara melalui jalan damai sangat jarang terjadi dan para pihak juga mengajukan banding.
3. Perkara tindak pidana khusus anak maupun narkotika yang umumnya terdakwa ataupun jaksa umumnya mengajukan upaya hukum selanjutnya (banding dan kasasi).

Tabel berikut menggambarkan pengukuran kinerja yang dicapai oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang tahun 2021.

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	80%	97%	121%
		d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	80%	100%	125%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	70%	87%	124%
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	60%	58%	97%

		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	60%	100%	167%
		h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	50%	N/A	N/A
		i. Indeks kepuasan pencari keadilan	80%	92%	115%
Rata-Rata Capaian Output					118%
2	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30%	0%	0%
		d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	N/A	100%
Rata-Rata Capaian Output					80%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	N/A
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0%	0%	N/A
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Output					100%

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	100%	200%
	Rata-Rata Capaian Output				200%
	NILAI RATA-RATA CAPAIAN TAHUN 2021				124%

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang Tahun 2021 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2021 Pengadilan Negeri Padang Panjang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Analisis Capaian Kinerja diperlukan untuk mendapatkan *feedback* (umpan balik) guna melakukan perbaikan terhadap Rencana Kinerja tahun berikutnya. Adapun analisis capaian kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang tahun 2021 sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN 1.

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

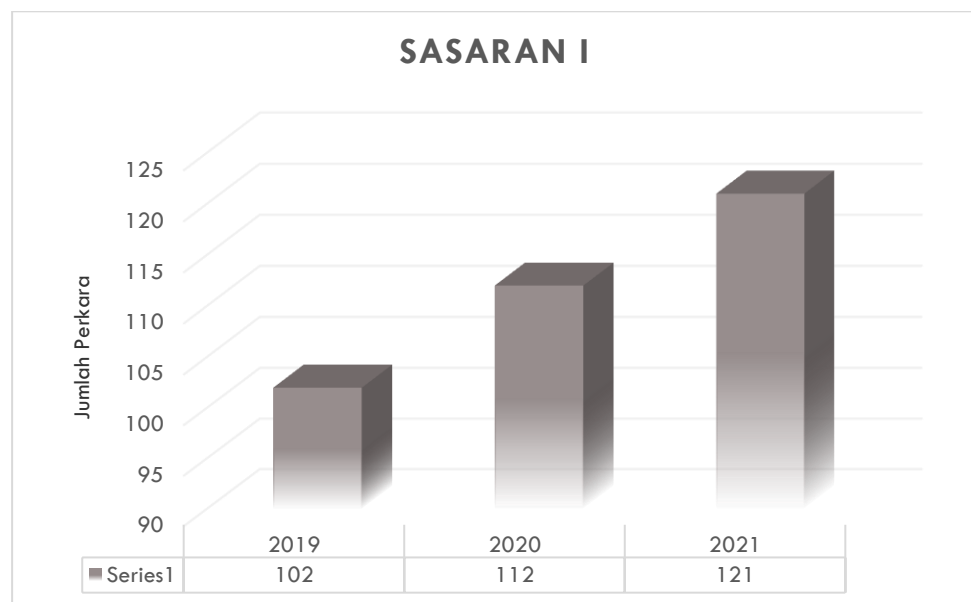
Dimaksudkan untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan diukur dari sembilan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.2 Sasaran 1 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian		
		2019	2020	2021
1	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%
	b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%
	c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	108%	109%	121%
	d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	104%	125%	125%

e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	102%	131%	124%
f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	42%	48%	97%
g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	167%	167%	167%
h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	N/A	N/A	N/A
i. Indeks kepuasan pencari keadilan	92%	115%	115%
Rata-Rata Capaian Kinerja	102%	112%	121%

Grafik 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel



Dari Tabel 3.2 menunjukkan bahwa rata-rata capaian sasaran terwujudnya proses peradilan pasti, transparan dan akuntabel tahun 2021 adalah sebesar 121%. capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 102% dan rata-rata capaian tahun 2019 yang sebesar 102% dihitung dengan indikator yang sama.

Analisa, data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Padang Panjang telah berhasil meningkatkan kinerjanya untuk sasaran ini, namun demikian Pengadilan Negeri Padang Panjang terus bergerak meningkatkan kinerjanya dengan terus berupaya melakukan perbaikan layanan dan berupaya menyelenggarakan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan.

Terdapat 9 (sembilan) Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini, yaitu:

a. Persentase Sisa Perkara Perdata Yang diselesaikan

Tabel 3.3 Keadaan Sisa Perkara Perdata yang harus diselesaikan

Tahun	Sisa Perkara Perdata Yang Harus Diselesaikan (tahun sebelumnya)	Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan	*Realisasi	Target	Capaian
2019	1	1	100%	100%	100%
2020	1	1	100%	100%	100%
2021	5	5	100%	100%	100%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan adalah perbandingan antara sisa perkara perdata yang diselesaikan dengan sisa perkara perdata yang harus diselesaikan (tahun sebelumnya). Adanya sisa perkara pada tahun sebelumnya disebabkan karena adanya perkara yang masuk pada akhir tahun 2020.

MATRIK KEADAAN PERKARA PERDATA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG TAHUN 2021

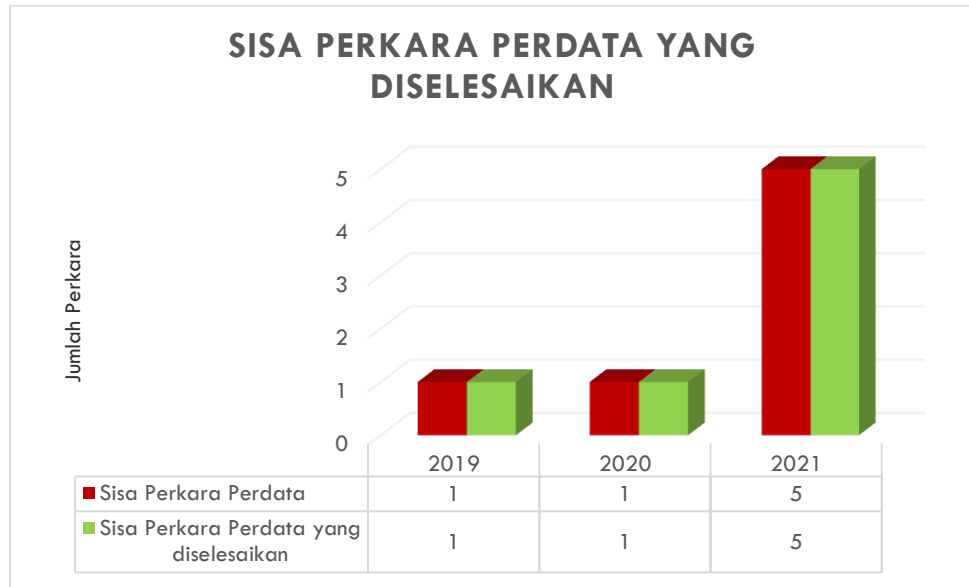
Tabel 3.4 Matriks keadaan perkara perdata tahun 2021

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2020	Perkara Masuk 2021	Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Ket
1	Perdata gugatan	5	8	11	2	
2	Perdata Permohonan	-	23	23	-	
3	Perdata Gugatan Sederhana	-	1	1	-	

Tabel 3.5 Indikator Kinerja Sasaran 1.a

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
		2019	2020	2021	Jangka Menengah		
1.a	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Grafik 2. sisa perkara perdata yang diselesaikan



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target kinerja selalu dapat tercapai semenjak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam menyelesaikan sisa perkara stabil dari tahun tahun sebelumnya dalam artian sisa perkara dari tahun sebelumnya selalu berhasil diselesaikan pada tahun berjalan, dan Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan pada renstra 2020-2024, indikator ini juga dapat tercapai, artinya Pengadilan Negeri Padang Panjang telah berhasil memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk mencapai target yang telah ditetapkan untuk indikator ini. Analisa, Artinya Pengadilan Negeri Padang Panjang telah berhasil memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai target yang telah ditetapkan untuk indikator ini.

b. Persentase Sisa Perkara Pidana Yang diselesaikan

Tabel 3.6 Keadaan Sisa Pidana yang harus diselesaikan

Tahun	Sisa Perkara Pidana Yang Harus Diselesaikan (tahun sebelumnya)	Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan	*Realisasi	Target	Capaian
2019	10	10	100%	100%	100%
2020	7	7	100%	100%	100%
2021	0	0	100%	100%	100%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan adalah perbandingan antara sisa perkara pidana yang diselesaikan dengan sisa perkara pidana yang harus diselesaikan (tahun sebelumnya). Pada tahun 2021, tidak ada perkara tahun 2020 yang menjadi sisa perkara pidana di tahun 2021, dikarenakan seluruh perkara pidana tahun 2020 diselesaikan pada tahun 2020 sehingga tidak ada sisa perkara pidana yang harus diselesaikan pada tahun 2021. Dan dapat diartikan bahwa seluruh perkara dapat diselesaikan tepat waktu.

MATRIK KEADAAN PERKARA PIDANA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG TAHUN 2021

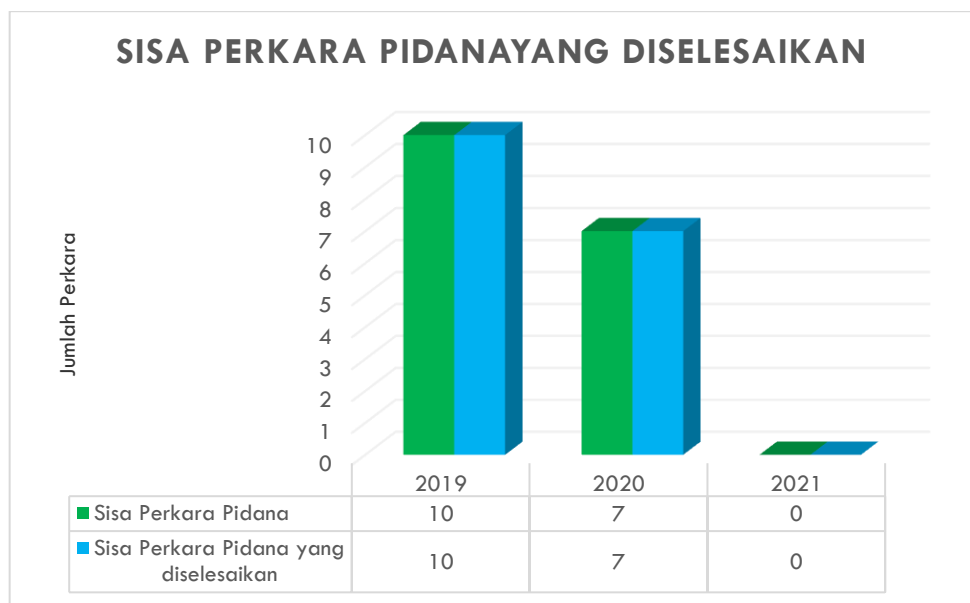
Tabel 3.7 Matriks Keadaan Perkara Pidana Tahun 2021

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2020	Perkara Masuk 2021	Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara 2021	Ket
1	Pidana Biasa	-	85	78	7	
2	Pidana Anak	-	2	2	-	
3	Pidana Cepat	-	6	6	-	
4	Pidana Cepat (Lalulintas)	-	650	650	-	

Tabel 3.8 Indikator Kinerja Sasaran 1.b

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
		2019	2020	2021	Jangka Menengah		
1.b	Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Grafik 3. sisa perkara pidana yang diselesaikan



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target kinerja selalu dapat tercapai semenjak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Untuk tahun 2021, tidak ada sisa perkara yang harus diselesaikan dikarenakan seluruh perkara tahun 2020 telah diselesaikan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam menyelesaikan sisa perkara stabil dari tahun tahun sebelumnya dalam artian sisa perkara dari tahun sebelumnya selalu berhasil diselesaikan pada tahun berjalan, dan Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan pada renstra 2020-2024, indikator ini juga dapat tercapai, artinya Pengadilan Negeri Padang Panjang telah berhasil memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk mencapai target yang telah ditetapkan untuk indikator ini.

Analisa, Artinya Pengadilan Negeri Padang Panjang telah berhasil memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

c. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu

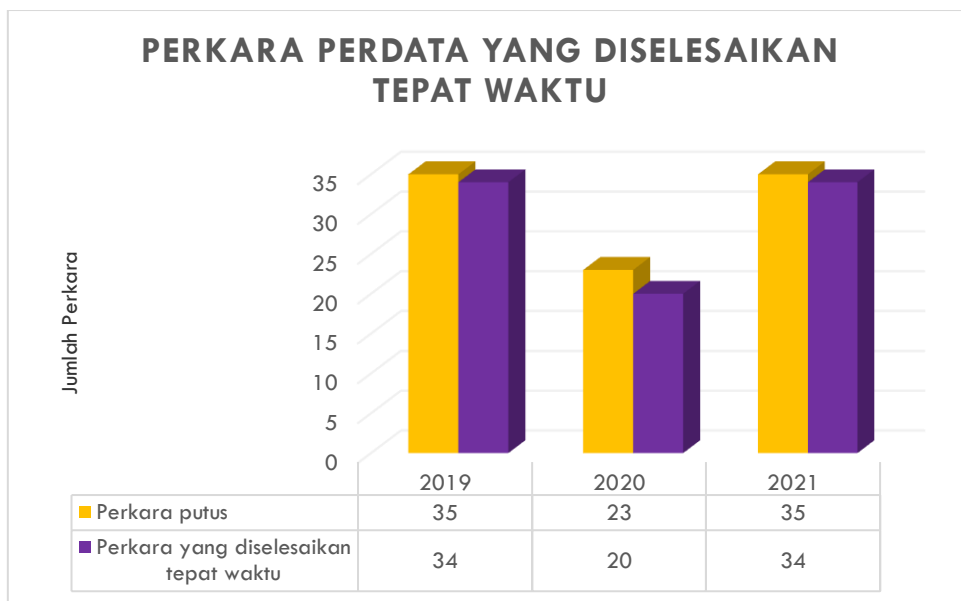
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu menggambarkan kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam menyelesaikan perkara perdata tepat waktu, sehingga tercapai sasaran peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sehingga dapat diprediksi waktu penyelesaian perkara. Indikator ini dikuantitatifkan sebagai **perbandingan jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan.**

Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara perdata Pengadilan Negeri Padang Panjang dari tahun 2019 sampai tahun 2021.

Tabel 3.9 Keadaan Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Perkara Putus tahun berjalan	Perkara Yang Diselesaikan tepat waktu	*Realisasi	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6
2019	35	34	97%	90%	108%
2020	23	20	87%	80%	109%
2021	35	34	97%	80%	121%

Grafik 4. Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu



Tabel 3.10 Indikator Kinerja Sasaran 1.c

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
		2019	2020	2021	Jangka Menengah		
1.c	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu						
	- Perdata	97%	87%	97%	80%	80%	121%

Rincian perkara putus berdasarkan jenis perkaranya pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.11 Rincian perkara putus perdata tahun 2021

No	Jenis Perkara	Perkara Yang Diputus	Perkara yang diputus tepat waktu
1	Perdata gugatan	11	10
2	Perdata Permohonan	23	23
3	Perdata Gugatan Sederhana	1	1
	Jumlah	35	34

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara perkara perdata yang diselesaikan tahun berjalan dengan perkara perdata yang ada (siswa perkara perdata tahun lalu dan perkara perdata yang masuk pada tahun berjalan). Berdasarkan tabel diatas, jumlah perkara perdata yang putus pada tahun 2021 adalah sebanyak 35 perkara yang terdiri dari 5 siswa perkara perdata gugatan tahun sebelumnya dan 6

perkara perdata masuk tahun 2021, 1 perdata gugatan sederhana dan 23 perdata permohonan, dan yang diputus secara tepat waktu sebanyak 34 Perkara sehingga diperoleh realisasi sebesar 97%. Pada tahun 2020 adalah sebanyak 23 perkara dan yang diputus secara tepat waktu sebanyak 20 Perkara. Pada tahun 2019, jumlah putusan perkara sebanyak 35 perkara dan yang diputus secara tepat waktu sebanyak 34 Perkara.

Target kinerja yang direncanakan pada tahun 2021 adalah 80 %, sehingga jika realisasi perkara perdata 97% dibandingkan dengan target kinerja maka akan diperoleh capaian sebesar 121% . Pada tabel diatas juga menunjukkan data bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dengan capaian kinerja perkara perkara perdata setiap tahunnya diatas 90%, yang menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang sangat baik.

Analisa, untuk indikator penyelesaian perkara pidana secara tepat waktu Pengadilan Negeri Padang Panjang dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam artian kinerja untuk indikator ini sangat baik..

d. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

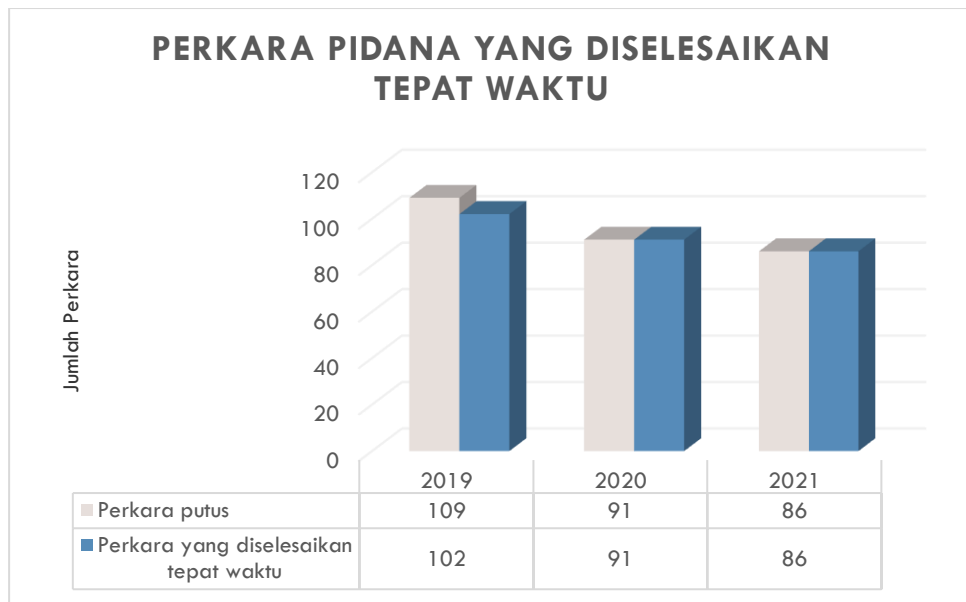
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu menggambarkan kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam menyelesaikan perkara pidana tepat waktu, sehingga tercapai sasaran peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sehingga dapat diprediksi waktu penyelesaian perkara. Indikator ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara pidana yang ada.

Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara pidana Pengadilan Negeri Padang Panjang dari tahun 2019 sampai tahun 2021.

Tabel 3.12 Keadaan perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Perkara Putus tahun berjalan	Perkara Yang Diselesaikan tepat waktu	*Realisasi	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6
2019	109	102	94%	90%	104%
2020	91	91	100%	80%	125%
2021	86	86	100%	80%	125%

Grafik 5. Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu



Tabel 3.13 Indikator Kinerja Sasaran 1.d

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
		2019	2020	2021	Jangka Menengah		
1.d	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu						
	- Pidana	94%	100%	100%	80%	80%	125%
	-						

Rincian perkara putus berdasarkan jenis perkaranya pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.14 Rincian putusan perkara pidana tahun 2021

No	Jenis Perkara	Perkara Yang Diputus	Perkara yang diputus tepat waktu
1	Pidana Biasa	78	78
2	Pidana Anak	2	2
3	Pidana Cepat	6	6
	Jumlah	86	86

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara perkara pidana yang diselesaikan tahun berjalan dengan perkara pidana yang ada. Berdasarkan tabel diatas, jumlah perkara pidana yang diselesaikan adalah sebanyak 86 perkara yang terdiri dari 78 perkara pidana biasa, pidana anak sebanyak 2 perkara dan pidana cepat sebanyak 6

perkara, sehingga diperoleh realisasi perkara pidana sebesar 100% Pada Tahun 2020, jumlah perkara putus sebanyak 91 perkara dan yang diputus tepat waktu sebanyak 91 perkara. Pada tahun 2019, jumlah perkara putus sebanyak 109 perkara dan yang diputus tepat waktu sebanyak 102 perkara.

Target kinerja yang direncanakan pada tahun 2021 adalah 80 %, sehingga jika realisasi perkara pidana 100% dibandingkan dengan target kinerja maka akan diperoleh capaian sebesar 125% . Pada tabel diatas juga menunjukkan data bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dengan capaian kinerja perkara perkara pidana setiap tahunnya diatas 90%, yang menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang sangat baik.

Analisa, untuk indikator penyelesaian perkara pidana secara tepat waktu Pengadilan Negeri Padang Panjang dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam artian kinerja untuk indikator ini sangat baik.

e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dibandingkan dengan jumlah putusan perkara. Dengan asumsi semakin banyak masyarakat yang menerima putusan dan tidak melakukan upaya hukum banding dapat diindikasikan bahwa putusan hakim semakin dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan, sehingga tercapai sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

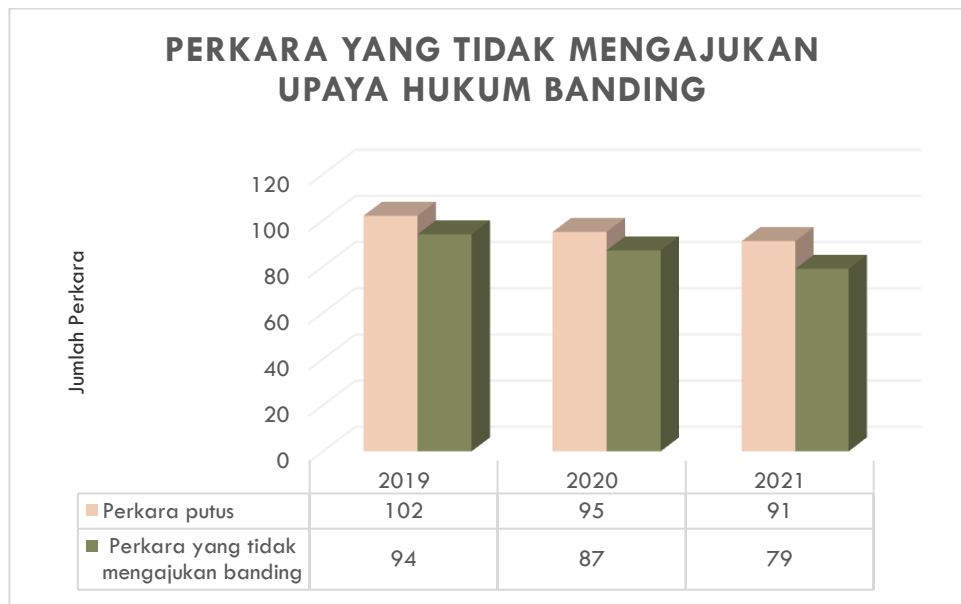
Tabel 3.15 Rincian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Tahun	Putusan Perkara	Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	*Realisasi	Target	Capaian
2019	102	94	92%	90%	102%
2020	95	87	92%	70%	131%
2021	91	79	87%	70%	124%

Tabel 3.16 Indikator Kinerja Sasaran 1.e

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
		2019	2020	2021	Jangka Menengah		
1.e	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding						
	- Banding	92%	92%	87%	70%	70%	124%

Grafik 6. perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding



Rincian perkara putus dan tidak mengajukan banding berdasarkan jenis perkaranya pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.17 Rincian perkara yang tidak mengajukan banding

No	Jenis Perkara	Perkara Yang Diputus	Perkara yang tidak mengajukan banding
1	Perdata Gugatan	11	7
2	Pidana Biasa	78	70
3	Pidana Anak	2	2
	Jumlah	91	79

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan antara putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diputus. Berdasarkan tabel diatas, jumlah perkara yang diputus pada tahun 2021 adalah sebanyak 91 perkara yang terdiri dari 11 perkara gugatan, 78 perkara pidana biasa dan 2 perkara pidana anak, dan yang tidak mengajukan banding sebanyak 79 Perkara sehingga diperoleh realisasi sebesar 87%. Pada tahun 2020 jumlah perkara yang diputus sebanyak 95 dan yang tidak mengajukan banding sebanyak 87 perkara. Pada tahun 2019, jumlah perkara yang diputus sebanyak 102 dan yang tidak mengajukan banding sebanyak 94 perkara.

Target kinerja yang direncanakan pada tahun 2021 adalah 70 %, sehingga jika realisasi yang tidak mengajukan banding sebesar 87% dibandingkan dengan target kinerja maka akan diperoleh capaian sebesar 124%. Pada tabel diatas juga menunjukkan data bahwa pada tahun 2021 dengan capaian kinerja diatas 90%, yang menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang sangat baik.

Analisa, dilihat dari data diatas persentase perkara yang tidak mengajukan upaya banding lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan Negeri Padang Panjang.

f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dibandingkan dengan jumlah putusan perkara. Dengan asumsi semakin banyak masyarakat yang menerima putusan dan tidak melakukan upaya hukum kasasi dapat diindikasikan bahwa putusan hakim semakin dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan, sehingga tercapai sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

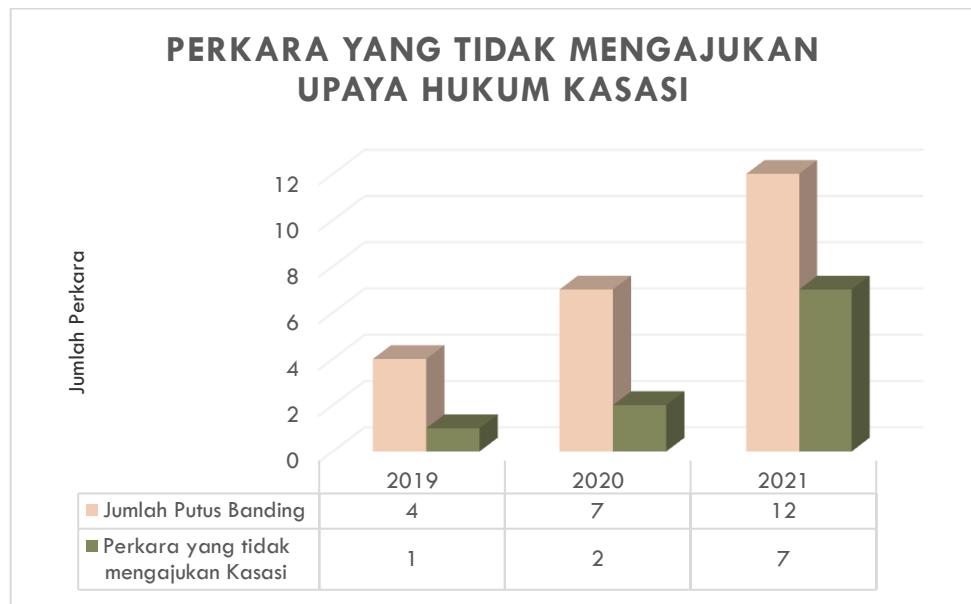
Tabel 3.18 Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Tahun	Jumlah Putus Banding	Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	*Realisasi	Target	Capaian
2019	4	1	25%	60%	42%
2020	7	2	29%	60%	48%
2021	12	7	58%	60%	97%

Tabel 3.19 Indikator Kinerja Sasaran 1.f

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
		2019	2020	2021	Jangka Menengah		
1.f	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi						
	- Kasasi	25%	29%	58%	60%	60%	97%

Grafik 7. perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi



Rincian perkara banding putus dan tidak mengajukan kasasi berdasarkan jenis perkaranya pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.20 Rincian putusan yang tidak mengajukan kasasi

No	Jenis Perkara	Perkara banding Yang Diputus	Perkara yang tidak mengajukan kasasi
1	Perdata Gugatan	4	2
2	Pidana Biasa	8	5
3	Pidana Anak	-	-
	Jumlah	12	7

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan antara putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara banding yang diputus. Berdasarkan tabel diatas, jumlah perkara banding yang diputus pada tahun 2021 adalah sebanyak 12 perkara yang terdiri dari 4 perkara gugatan dan 8 perkara pidana, yang tidak mengajukan kasasi sebanyak 7 Perkara sehingga diperoleh realisasi sebesar 58%. Pada tahun 2020, perkara banding yang diputus sebanyak 7 perkara dan yang tidak mengajukan kasasi sebanyak 2 perkara. Pada tahun 2019, perkara banding yang diputus sebanyak 4 perkara dan yang tidak mengajukan kasasi sebanyak 1 perkara. Target

kinerja yang direncanakan pada tahun 2021 adalah 60 %, sehingga jika realisasi yang tidak mengajukan kasasi sebesar 58% dibandingkan dengan target kinerja maka akan diperoleh capaian sebesar 97%.

Analisa, dilihat dari data diatas terjadi peningkatan dari tahun 2020 terhadap persentase perkara yang tidak mengajukan upaya kasasi, hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan.

g. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dibandingkan dengan jumlah putusan perkara. Dengan asumsi semakin banyak masyarakat yang menerima putusan dan tidak melakukan upaya hukum peninjauan kembali dapat diindikasikan bahwa putusan hakim semakin dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan, sehingga tercapai sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Tabel 3.21 Putusan perkara yang tidak mengajukan upaya PK

Tahun	Putusan Perkara Kasasi	Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	*Realisasi	Target	Capaian
		PK	PK	PK	PK
2019	1	1	100%	60%	167%
2020	1	1	100%	60%	167%
2021	0	0	100%	60%	167%

Tabel 3.22 Indikator Kinerja Sasaran 1.g

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
		2019	2020	2021	Jangka Menengah		
1.g	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali						
	PK	100%	100%	100%	60%	60%	167%

Rincian perkara kasasi putus dan tidak mengajukan PK berdasarkan jenis perkaranya pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.23 Rincian perkara yang tidak mengajukan PK

No	Jenis Perkara	Perkara kasasi Yang Diputus	Perkara yang tidak mengajukan PK
1	Perdata Gugatan	-	-
2	Pidana Biasa	-	-
3	Pidana Anak	-	-
	Jumlah	-	-

Grafik 8. perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali



Ukuran realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah perbandingan antara putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK dengan jumlah perkara kasasi yang diputus. Berdasarkan tabel diatas, jumlah perkara kasasi yang diputus pada tahun 2021 adalah sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan PK sebanyak 0 Perkara sehingga diperoleh realisasi sebesar 100%. Pada tahun 2020, perkara kasasi yang diputus sebanyak 1 perkara dan yang tidak mengajukan PK sebanyak 1 perkara. Pada tahun 2019, jumlah perkara kasasi yang diputus sebanyak 1 perkara dan yang tidak mengajukan PK sebanyak 1 perkara.

Target kinerja yang direncanakan pada tahun 2021 adalah 60 %, sehingga jika realisasi yang tidak mengajukan PK sebesar 100% dibandingkan dengan target kinerja maka akan diperoleh capaian sebesar 167% .

Analisa, dilihat dari data diatas persentase perkara yang tidak mengajukan upaya PK sama jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini mengindikasikan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap putusan badan peradilan artinya terjadi peningkatan kinerja untuk indikator ini.

h. Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi dan jumlah perkara pidana anak Penyelesaian melalui diversi diartikan perkara yang telah masuk dan ditangani di Pengadilan yang penyelesaiannya melalui diversi di Pengadilan.

Dari 2 perkara pidana anak pada tahun 2021 tidak ada perkara yang diselesaikan melalui diversi, hal ini karena pada umumnya perkara anak yang diselesaikan pada Tahun 2021 merupakan tindak pidana dengan dakwaan yang diancam dengan hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak dilaksanakan diversi sesuai dengan Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak sehingga Realisasinya tidak dapat dihitung.

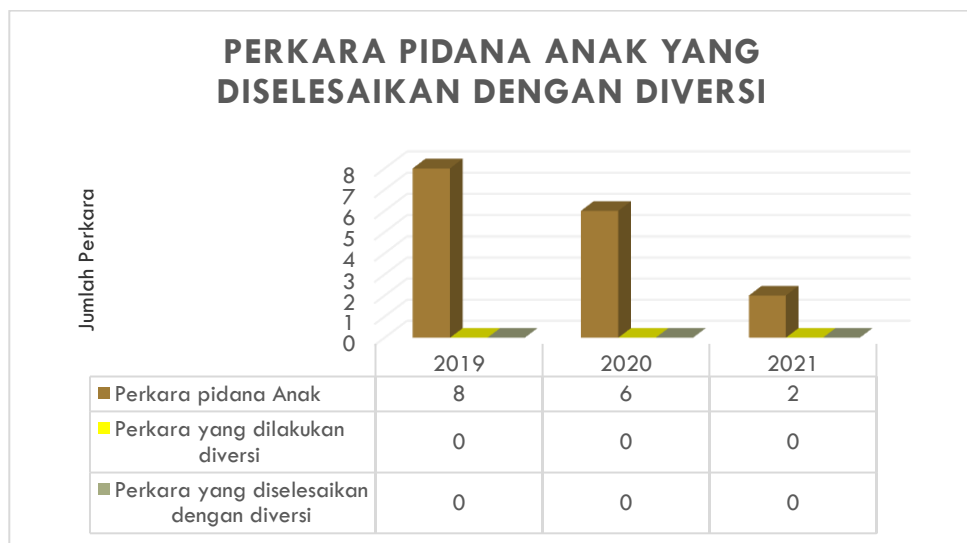
Tabel 3.24 Perkara pidana anak yang dilakukan diversi

Tahun	Perkara Pidana Anak Yang Masuk	Perkara Pidana Anak Yang Dilakukan Diversi	Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan secara Diversi	*Realisasi	Target	Capaian
2019	8	0	0	0%	20%	N/A
2020	6	0	0	0%	50%	N/A
2021	2	0	0	0%	50%	N/A

Tabel 3.25 Indikator Kinerja Sasaran 1.h

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
		2019	2020	2021	Jangka Menengah		
1.h	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	0%	0%	0%	50%	50%	N/A

Grafik 9. perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi



Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi adalah perbandingan antara perkara pidana anak yang masuk dengan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi. Berdasarkan tabel diatas, jumlah perkara pidana anak yang masuk pada tahun 2021 adalah sebanyak 2 perkara dan yang diselesaikan dengan diversi sebanyak 0 Perkara sehingga diperoleh realisasi sebesar 0%. Pada tahun 2020, perkara pidana anak yang masuk sebanyak 6 perkara dan yang diselesaikan dengan diversi sebanyak 0 perkara. Pada tahun 2019, jumlah perkara pidana anak yang masuk sebanyak 8 perkara dan yang diselesaikan dengan diversi sebanyak 0 perkara. Hal ini karena pada umumnya perkara anak yang diselesaikan pada Pengadilan Negeri Padang Panjang merupakan perkara pidana yang dakwaannya diancam dengan hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun sehingga tidak dilaksanakan upaya diversi.

Analisa, dilihat dari data diatas kinerja untuk indikator perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi dan belum dapat memenuhi target jangka menengah yang telah ditetapkan pada rencana strategis tahun 2020-2024 dikarenakan jenis perkara pidana anak yang ditangani pada Pengadilan Negeri Padang Panjang merupakan tindak pidana dengan ancaman lebih dari 7 (tujuh) tahun.

i. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Indikator kinerja ini ditunjukkan dengan survey indeks kepuasan masyarakat pada instansi pemerintahan dengan berpedoman pada Permenpan No 14 Tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Padang Panjang telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat untuk semester I dari bulan Januari 2021 sampai dengan Juni 2021. Dari hasil survey tersebut diperoleh bahwa indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan Pengadilan Negeri Padang Panjang sebesar 93,06%. Sedangkan untuk Triwulan III, indeks survey kepuasan masyarakat dengan nilai 92,06% dan Triwulan IV dengan nilai 93,01%, dengan demikian rata-rata realisasinya sebesar 92,01% dan capaian untuk indikator ini sebesar 115%, artinya pelayanan peradilan Pengadilan Negeri Padang Panjang kepada masyarakat pencari keadilan termasuk kategori

“SANGAT BAIK”, yang masih membutuhkan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 3.26 Persentase Survey Kepuasan Masyarakat

Tahun	Persentase Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		Target Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		Capaian
	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	
2019	75%	75%	80%	80%	94%
2020	92%	92%	80%	80%	115%
2021	93,06%	92,5%	80%	80%	115%

Tabel 3.27 Indikator Kinerja Sasaran 1.i

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
		2019	2020	2021	Jangka Menengah		
1.f	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	92%	92%	80%	80%	115%

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019, realisasi untuk indikator survey kepuasan masyarakat sebesar 75%. Pada Tahun 2020, realisasi untuk indikator survey kepuasan masyarakat sebesar 92%. Pada Tahun 2021, realisasi indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan mencapai nilai 92% sehingga capaian pada tahun 2021 sebesar 115%

Analisa, dilihat dari data diatas kinerja untuk indikator indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan telah memenuhi target jangka menengah yang telah ditetapkan pada rencana strategis tahun 2020-2024, artinya kinerja untuk indikator telah dipenuhi oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang.

SASARAN 2

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

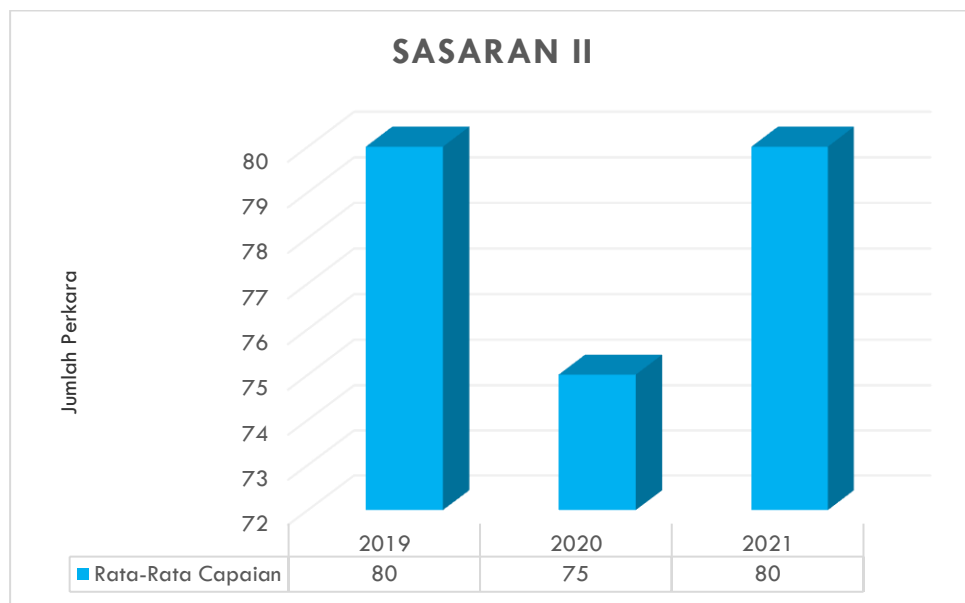
Sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Padang Panjang. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara merupakan sasaran Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Padang Panjang yang tertuang dalam rencana strategis Pengadilan Negeri Padang Panjang tahun 2020-2024.

Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja yang diwujudkan melalui program peningkatan manajemen peradilan umum. Realisasi dan capaian tahun 2021 untuk sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.28 Sasaran 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun		
		2019	2020	2021
2	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
	b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
	c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	0%	0%	0%
	d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
	e. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%	N/A	100%
	Rata-Rata Capaian Kinerja	80%	75%	80%

Grafik 10. Sasaran 2



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat pada tahun 2021 secara keseluruhan stabil dengan tahun sebelumnya untuk capaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tahun 2021 ini telah berusaha memperbaiki kinerjanya untuk mewujudkan sasaran ini melalui program peningkatan manajemen peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tahun-tahun selanjutnya berusaha memperbaiki kinerjanya untuk mewujudkan sasaran ini melalui program peningkatan manajemen peradilan Analisa terhadap masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

a. Persentase Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan jumlah salinan putusan perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus, Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa semakin banyak isi putusan yang diterima tepat waktu semakin meningkat efektivitas pengelolaan penyampaian salinan putusan perkara, dalam artian semakin singkat waktu penyelesaian perkara perdata sampai putusan diterima ditangan para pihak, sehingga tercapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kepuasannya pencari keadilan.

Tabel 3.29 Jumlah putusan perkara perdata yang dikirim tepat waktu

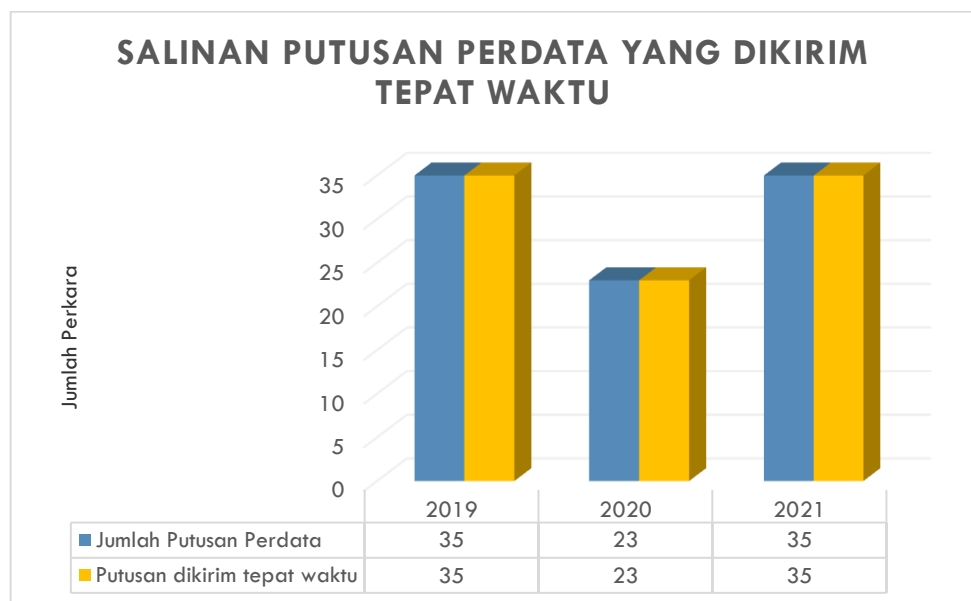
Tahun	Jumlah Perkara Perdata	Jumlah Putusan yang dikirim tepat waktu	*Realisasi	Target	Capaian
2019	35	35	100%	100%	100%
2020	23	23	100%	100%	100%
2021	35	35	100%	100%	100%

Pada tahun 2021 terdapat 35 putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang yang terdiri dari 11 putusan perkara perdata Gugatan, 1 perdata gugatan sederhana dan 23 putusan perkara perdata permohonan. Putusan-putusan tersebut semuanya telah disampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan secara layak dan patut sesuai dengan peraturan yang berlaku, artinya realisasi untuk indikator ini sebesar 100% dengan capaian 100%. Perbandingan dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah bisa dilihat tabel berikut:

Tabel 3.30 Indikator Kinerja Sasaran 2.a

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Target	Capaian
		2019	2020	2021	Jangka Menengah	Tahun 2021	Tahun 2021
2.a	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Grafik 11. Sasaran 2.a



Berdasarkan tabel diatas, jumlah perkara perdata yang putus pada tahun 2021 adalah sebanyak 35 perkara yang terdiri dari Perdata Gugatan 11 Perkara, Gugatan Sederhana 1 Perkara dan Permohonan 23 Perkara dan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu sebanyak 35 Perkara. Pada tahun 2020, jumlah putusan perkara perdata sebanyak 23 Perkara dan yang dikirim secara tepat waktu adalah sebanyak 23 Perkara. Selanjutnya pada tahun 2019, jumlah putusan perkara perdata yang diputus adalah sebanyak 35 Perkara dan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu sebanyak 35 Perkara.

Target kinerja yang direncanakan pada tahun 2021 adalah 100 %, sehingga jika realisasi salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah 100% dibandingkan dengan target kinerja maka akan diperoleh capaian sebesar 100% . Pada tabel diatas juga menunjukkan data bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dengan capaian kinerja perkara perkara perdata setiap tahunnya diatas 90%, yang menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang Sangat baik. Rincian perkara putus berdasarkan jenis perkaranya pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.31 Rincian putusan perkara perdata yang dikirim tepat waktu

No	Jenis Perkara	Perkara Yang Diputus	Salinan dikirim tepat waktu
1	Perdata gugatan	11	11
2	Perdata Permohonan	23	23
3	Perdata Gugatan Sederhana	1	1
	Jumlah	35	35

Analisa, dilihat dari data diatas untuk indikator ini realisasi dan capaiannya stabil dari tahun ke tahun, artinya indikator kinerja ini berhasil dipenuhi dengan baik oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang.

b. Persentase Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan jumlah salinan putusan pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diputus, Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa semakin banyak isi putusan yang diterima tepat waktu semakin meningkat efektivitas pengelolaan penyampaian salinan putusan perkara, dalam artian semakin singkat waktu penyelesaian perkara pidana sampai putusan diterima ditangan para pihak, sehingga tercapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kepuasannya pencari keadilan.

Tabel 3.32 Jumlah putusan perkara pidana yang dikirim tepat waktu

Tahun	Jumlah Perkara Pidana	Jumlah Putusan yang dikirim tepat waktu	*Realisasi	Target	Capaian
2019	109	109	100%	100%	100%
2020	91	91	100%	100%	100%
2021	86	86	100%	100%	100%

Pada tahun 2021 terdapat 86 putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang. Putusan-putusan tersebut semuanya telah disampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan secara layak dan patut sesuai dengan peraturan yang berlaku, artinya realisasi untuk indikator ini sebesar 100% dengan capaian 100%. Perbandingan dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah bisa dilihat tabel berikut:

Tabel 3.33 Indikator Kinerja Sasaran 2.b

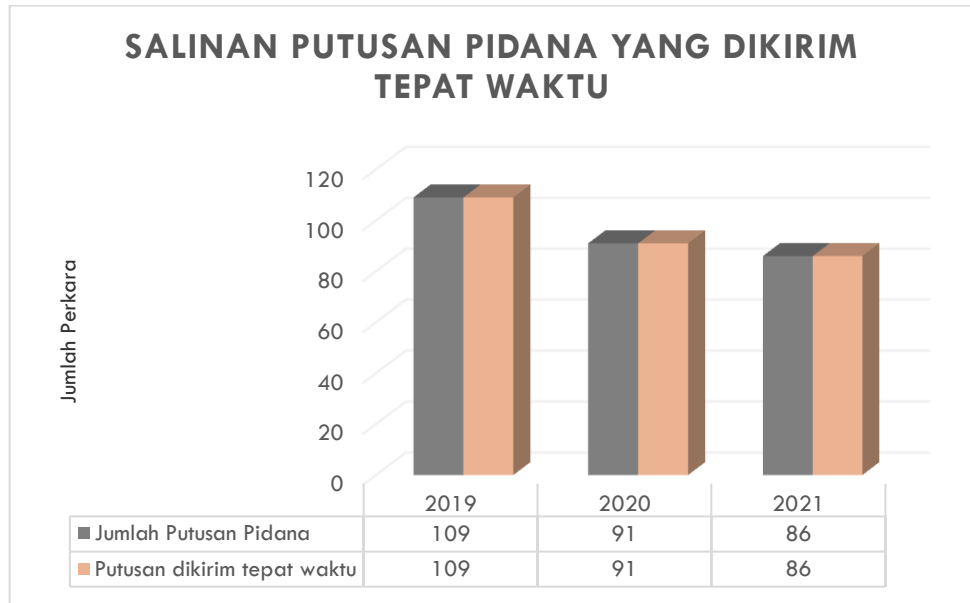
No	Indikator Kinerja	Realisasi				Target	Capaian
		2019	2020	2021	Jangka Menengah	Tahun 2021	Tahun 2021
2.b	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Rincian perkara putus berdasarkan jenis perkaranya pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.34 Rincian putusan perkara pidana yang dikirim tepat waktu

No	Jenis Perkara	Perkara Yang Diputus	Salinan dikirim tepat waktu
1	Pidana Biasa	78	78
2	Pidana Cepat	6	6
3	Pidana Anak	2	2
	Jumlah	86	86

Grafik 12. Sasaran 2.b



Berdasarkan tabel diatas, jumlah perkara pidana yang putus pada tahun 2021 adalah sebanyak 86 perkara yang terdiri dari Pidana Biasa 78 Perkara, Pidana Cepat 6 Perkara dan Pidana Anak 2 Perkara dan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu sebanyak 86 Perkara. Pada tahun 2020, jumlah putusan perkara pidana sebanyak 91 Perkara dan yang dikirim secara tepat waktu adalah sebanyak 91 Perkara Selanjutnya pada tahun 2019, jumlah putusan perkara pidana yang diputus adalah sebanyak 109 Perkara dan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu sebanyak 109 Perkara.

Target kinerja yang direncanakan pada tahun 2021 adalah 100%, sehingga jika realisasi salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah 100% dibandingkan dengan target kinerja maka akan diperoleh capaian sebesar 100% . Pada tabel diatas juga menunjukkan data bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dengan capaian kinerja perkara perkara perdata setiap tahunnya diatas 90%, yang menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang Sangat baik.

Analisa, dilihat dari data diatas untuk indikator ini realisasi dan capaiannya stabil dari tahun ke tahun yaitu tetap berada pada nilai 100%, artinya indikator kinerja ini berhasil dipenuhi dengan baik oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang.

c. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Ukuran relaisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan perkara yang dilakukan mediasi. Tabel dibawah menunjukkan bahwa pada tahun 2021 jumlah perkara yang dilakukan mediasi adalah sebanyak 4 (empat) perkara dan yang berhasil diselesaikan dengan mediasi adalah 0 (nol) perkara atau realisasinya adalah 0% (nol), realisasi ini tidak memenuhi target yang ditentukan, sehingga dapat dikatakan bahwa proses mediasi dalam penyelesaian perkara menurun di Pengadilan Negeri Padang Panjang.

Tabel 3.35 Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

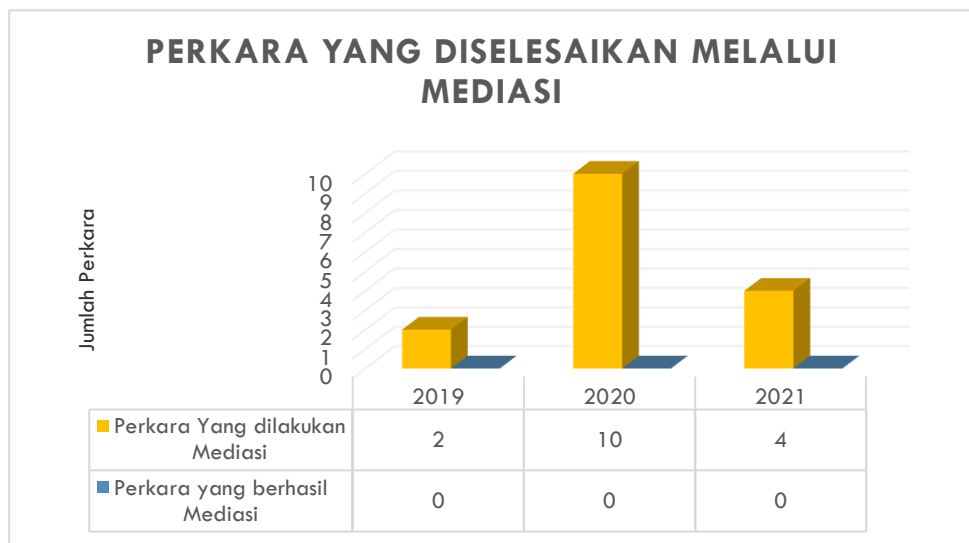
Tahun	Perkara yang dilakukan Mediasi	Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	*Realisasi	Target	Capaian
2019	2	0	0%	30%	0%
2020	10	0	0%	30%	0%
2021	4	0	0%	30%	0%

*) Perbandingan perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan perkara yang dilakukan mediasi

Tabel 3.36 Indikator Kinerja Sasaran 2.c

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
		2019	2020	2021	Jangka Menengah		
2.c	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	0%	0%	0%	30%	30%	0%

Grafik 13. Sasaran 2.c



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa tidak tercapainya mediasi sebagai penyelesaian perkara, hal ini timbul karena beberapa faktor, antara lain karena pada umumnya gugatan yang masuk merupakan gugatan atas tanah dan harta lainnya dimana masing-masing pihak merasa berhak atas yang disengketakan sehingga tidak dapat diselesaikan melalui mediasi.

Pada Tahun 2021, jumlah perkara yang dilakukan mediasi sebanyak 4 Perkara dan yang berhasil sebanyak 0 (nol) Perkara. Pada tahun 2020, jumlah perkara yang dilakukan mediasi sebanyak 10 perkara dan yang berhasil mediasi sebanyak 0 (nol) perkara begitu juga pada tahun 2019, jumlah perkara yang dilakukan mediasi sebanyak 2 perkara dan tidak ada yang berhasil..

Capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi belum sebanding dengan jumlah perkara masuk ke Pengadilan Negeri Padang Panjang. Ini menandakan belum adanya kesadaran masyarakat akan arti penting mediasi dalam berperkara. Namun itu juga menjadi motivasi bagi Pengadilan Negeri Padang Panjang khususnya hakim mediator untuk meningkatkan kemampuan dalam hal mediasi dan dalam memberikan pemahaman-pemahaman tentang mediasi kepada para pihak.

Analisa, hal ini belum meningkatnya kesadaran masyarakat pencari keadilan untuk menyelesaikan gugatan melalui jalan damai dan dapat disimpulkan untuk indikator ini kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang belum tercapai.

d. Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Yang Diajukan Secara Lengkap Dan Tepat Waktu

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah perkara yang dimohonkan upaya hukum. kondisi pengajuan upaya hukum pada Pengadilan Negeri Padang Panjang selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

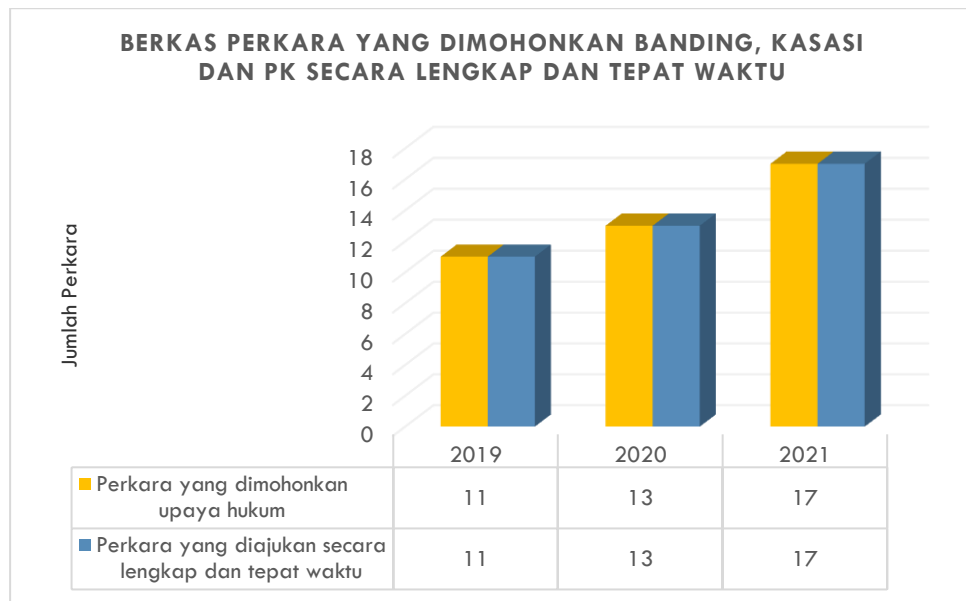
Tabel 3.37 Persentase berkas perkara yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Tahun	Perkara yang dimohonkan upaya hukum		Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkaptepat waktu		*Realisasi	Target	Capaian
	Pidana	Perdata	Pidana	Perdata			
2019	8	3	8	3	100%	100%	100%
2020	5	8	5	8	100%	100%	100%
2021	11	6	11	6	100%	100%	100%

Tabel 3.38 Indikator Kinerja Sasaran 2.d

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
		2019	2020	2021	Jangka Menengah		
2.d	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Grafik 14. Sasaran 2.d



Untuk tahun 2019, jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum adalah 11 perkara terdiri dari 8 perkara pidana dan 3 perkara perdata dan telah dikirim secara lengkap dan tepat waktu. Untuk tahun 2020, jumlah perkara yang mengajukan upaya adalah 13 perkara terdiri dari 5 perkara pidana dan 8 perkara perdata. Pada tahun 2021, yang mengajukan upaya hukum banding berjumlah 17 perkara yang terdiri dari 11 perkara pidana dan 6 perkara perdata. Untuk tahun 2021, berkas yang mengajukan

upaya hukum telah dikirim secara tepat waktu dan lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam hal pengajuan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum telah dilaksanakan secara maksimal karena setiap berkas banding, kasasi maupun PK sebelum dilakukan pengiriman, selalu dilakukan pengecekan baik oleh Panitera Muda Pidana atau Perdata dan juga oleh Panitera sehingga berkas yang dikirim lengkap sesuai dengan Pedoman dari Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/2018 tentang Pedoman Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi pada Pengadilan Tingkat Pertama sehingga target tersebut dapat tercapai.

Kinerja berkas yang diajukan banding, kasasi dan pk secara lengkap dan tepat waktu dapat memenuhi target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Padang Panjang tahun 2020-2024. Penyelesaian target tersebut tidak lepas dari efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang efektif sehingga realisasi 100%.

Analisa, Hal ini menunjukkan bahwa prosedur terhadap tata cara pengajuan banding, Kasasi maupun PK telah dapat di penuhi oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang. Dengan terpenuhinya semua prosedur dan tata cara pengajuan banding, Kasasi dan PK ini dapat memudahkan dan mengefisienkan waktu penyelesaian perkara sehingga dapat terpenuhi sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

e. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

Pengadilan Negeri Padang Panjang menargetkan Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus adalah sebesar 100%. Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat merupakan putusan perkara Tipikor dan pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, untuk tahun 2021 tidak ada perkara yang menarik perhatian masyarakat, dikarenakan perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri / Tipikor Padang, sehingga perkara yang diperiksa di Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah perkara pidana biasa dan pidana khusus anak.

Tabel 3.39 Jumlah putusan perkara Tipikor

Tahun	Putusan Perkara Tipikor/menarik perhatian masyarakat	Amar putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload	*Realisasi	Target	Capaian
2019	1	1	100%	100%	100%
2020	0	0	0%	90%	N/A
2021	0	0	100%	100%	100%

Pada Tahun 2019, terdapat 1 (satu) perkara yang menarik perhatian masyarakat selain perkara korupsi yaitu perkara tindak pidana pembunuhan sehingga realisasinya mencapai 100%. Namun. Untuk tahun 2020, tidak ada perkara yang menarik perhatian masyarakat. Untuk tahun 2021 tidak ada perkara yang menarik perhatian masyarakat pada Pengadilan Negeri Padang Panjang baik itu perkara Tipikor maupun perkara yang menarik perhatian masyarakat lainnya, namun demikian semua perkara yang telah diputus pada Pengadilan Negeri Padang Panjang di tahun 2021 semuanya telah diupload di website Direktori Putusan Mahkamah Agung RI sesuai dengan SK KMA 1-144 tahun 2011. Dengan kata lain kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk indikator ini sudah dapat tercapai walaupun tidak ada perkara yang menarik perhatian masyarakat/ Perkara Tipikor di Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tahun 2021.

Namun, semua putusan dari tahun 2015 sudah diupload di website Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan memperoleh informasi sesuai dengan SEMA No 6 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Analisa, untuk pencapaian indikator ini tidak dapat diperhitungkan dikarenakan perkara yang menarik perhatian masyarakat / perkara Tipikor tidak dipersidangkan di Pengadilan Negeri Padang Panjang walaupun demikian, seluruh putusan perkara yang telah diputus pada Pengadilan Negeri Padang Panjang di Tahun 2021 semuanya telah diupload di website Direktori Putusan Mahkamah Agung sehingga realisasi nya dianggap telah mencapai 100%.

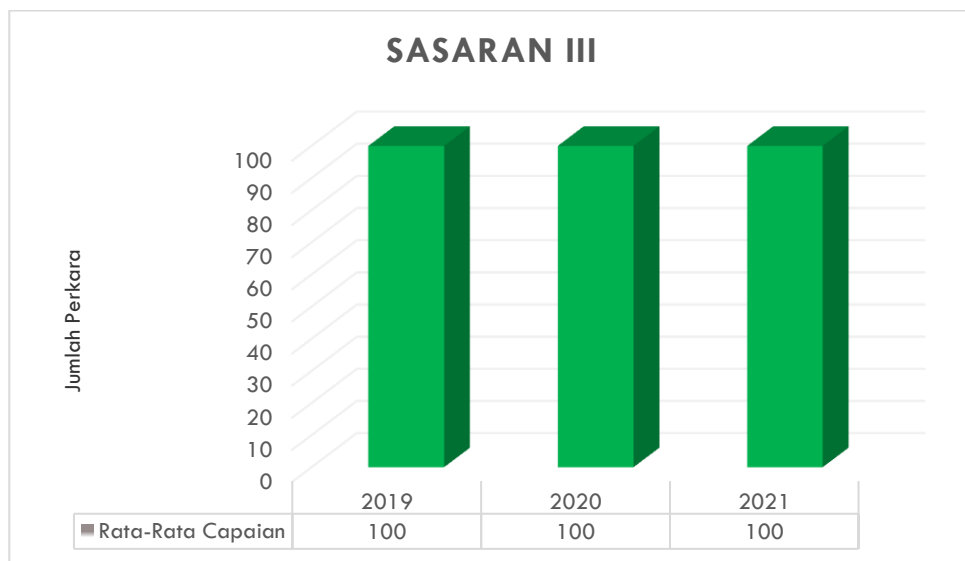
SASARAN 3

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Tabel 3.40. Indikator Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun		
		2019	2020	2021
3	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A	N/A	N/A
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	N/A	N/A	N/A
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	100%	100%
	Rata-rata capaian kinerja	100%	100%	100%

Grafik 15. Sasaran 3



Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini, yaitu:

a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Tabel 3.41. Jumlah Perkara Prodeo

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	*Realisasi	Target	Capaian
2019	0	0	0%	0%	N/A
2020	0	0	0%	0%	N/A
2021	0	0	0%	0%	N/A

Tabel 3.42. Indikator Kinerja Sasaran 3.a

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
		2019	2020	2021	Jangka Menengah		
3.a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	0%	N/A

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo. Pada tahun 2021, tidak ada perkara prodeo yang masuk ke Pengadilan Negeri Padang Panjang, disebabkan tidak terdapat dalam DIPA Pengadilan Negeri Padang Panjang, sehingga untuk indikator realisasi nya tidak dapat dihitung dan diperbandingkan. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak bisa melakukan sosialisasi mengenai pembebasan biaya perkara (perkara Prodeo) kepada masyarakat melalui website, spanduk, banner, liflet, dll dengan harapan informasi pembebasan biaya perkara bisa sampai kepada masyarakat tidak mampu.

Analisa, pada tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya, Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak menerima anggaran pada DIPA untuk menyelesaikan perkara prodeo sehingga indikator tidak dapat diperhitungkan.

b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan. Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak melaksanakan system ini karena Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak memiliki zeetingplat, tidak melaksanakan sidang keliling ataupun tidak memiliki gedung-gedung lainnya diluar gedung pengadilan. Oleh karena itu untuk indikator ini ditargetkan sebesar 0%, sehingga dengan realisasi 0%. Untuk tahun 2021, realisasi untuk penyelesaian perkara di luar gedung Pengadilan tidak dapat diperhitungkan karena Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak menerima anggaran untuk pelaksanaan pada DIPA. Adapun perbandingan dengan tahun sebelumnya adalah :

Tabel 3.43. Jumlah perkara di luar gedung Pengadilan

Tahun	Jumlah Perkara Yang Seharusnya Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	*Realisasi	Target	Capaian
2019	0	0	0%	0%	N/A
2020	0	0	0%	0%	N/A
2021	0	0	0%	0%	N/A

Tabel 3.44. Indikator Kinerja Sasaran 3.b

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
		2019	2020	2021	Jangka Menengah		
3.b	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0%	0%	0%	0%	N/A

Analisa, pada tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya, Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak menerima anggaran pada DIPA untuk menyelesaikan perkara diluar gedung Pengadilan dan Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak memiliki gedung di luar gedung Pengadilan sehingga indikator tidak dapat.

c. **Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)**

Sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, Pengadilan Negeri Padang Panjang telah melakukan pelayanan bantuan hukum pada tahun 2021. Pada tahun 2021 dari 56 orang pencari keadilan yang datang sebanyak 56 orang telah dilayani oleh piket pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang. Pada tahun 2021, tidak banyaknya para pencari keadilan yang datang ke Posbakum adalah dikarenakan adanya bencana pandemi Covid-19 .Keadaan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

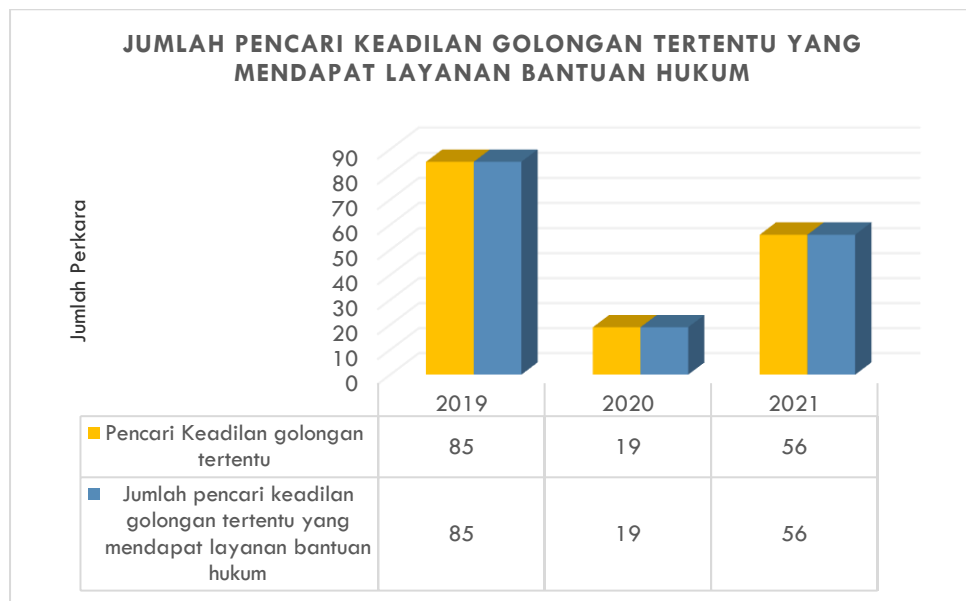
Tabel 3.45. Jumlah pencari keadilan

Tahun	Pencari keadilan golongan tertentu	Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	*Realisasi	Target	Capaian
2019	85	85	100%	100%	100%
2020	19	19	100%	100%	100%
2021	56	56	100%	100%	100%

Tabel 3.46 Indikator Kinerja Sasaran 3.c

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Target	Capaian
		2019	2020	2021	Jangka Menengah	Tahun 2021	Tahun 2021
3.c	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum						
	Pidana	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Grafik 16. Indikator Kinerja Sasaran 3.c



Pada tahun 2019, jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 85 orang dan yang mendapatkan layanan hukum sebanyak 85 orang. Selanjutnya pada tahun 2020, jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 19 orang dan yang mendapatkan layanan sebanyak 19 orang. Pada tahun 2021, jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 56 orang dan yang mendapatkan layanan hukum sebanyak 56 orang. Dapat terlihat bahwa kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk

indikator ini sangat bagus, telah tercapai capaian target yang telah ditetapkan, sehingga tercapai sasaran yang diinginkan yaitu meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Kegiatan pos bantuan hukum yang melayani masyarakat miskin dan terpinggirkan ini dibiayai melalui program peningkatan manajemen peradilan umum dengan kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum yang untuk tahun 2021 dari 192 jam layanan, walaupun para pencari keadilan yang datang tidak sebanyak tahun 2019, hal ini disebabkan karena adanya bencana pandemi covid-19 pada tahun 2021.

Analisa, Hal ini menunjukkan bahwa kinerja untuk indikator ini berupa pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) pada Pengadilan Negeri Padang Panjang selama tahun 2021 sudah sangat baik.

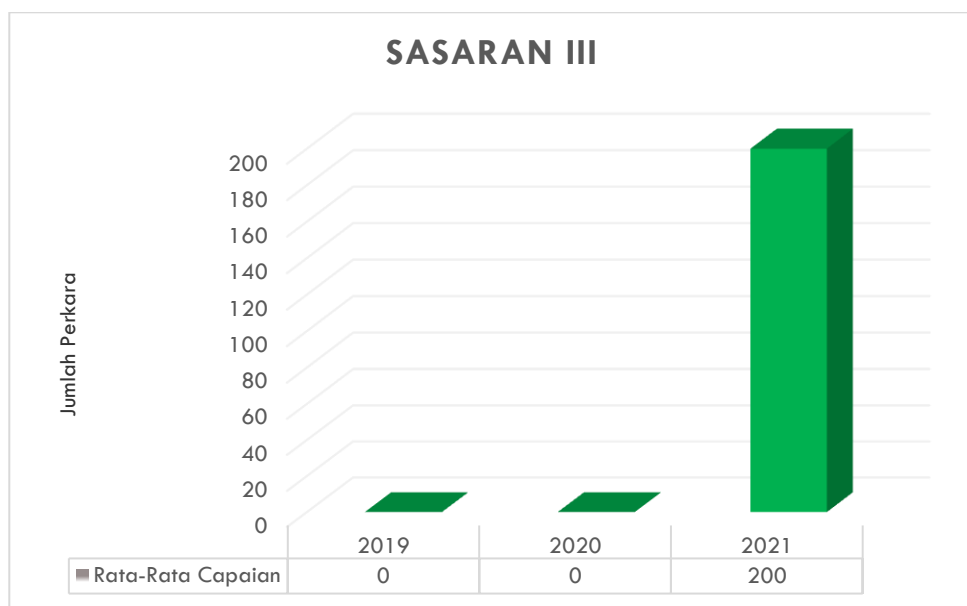
SASARAN 4

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Tabel 3.47. Indikator Kinerja Sasaran 4

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun		
		2019	2020	2021
4	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	N/A	N/A	200%
	Rata-rata capaian kinerja	N/A	N/A	200%

Grafik 17. Sasaran 3



Terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini, yaitu:

a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Tabel 3.48. Jumlah Eksekusi

Tahun	Jumlah Permohonan Eksekusi	Jumlah Eksekusi	*Realisasi	Target	Capaian
2019	0	0	0%	50%	N/A
2020	0	0	0%	50%	N/A
2021	1	1	100%	50%	200%

Tabel 3.49. Indikator Kinerja Sasaran 4.a

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
		2019	2020	2021	Jangka Menengah		
3.a	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)						
		0%	0%	100%	50%	50%	200%

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) yang ditargetkan 50% dari jumlah permohonan eksekusi pada tahun 2021 sebanyak 2 perkara, yang permohonan eksekusi atas perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan eksekusi, dan 1 (satu) perkara telah dicabut oleh para pihak dan 1 (satu) perkara telah ditindaklanjuti sehingga persentase realisasi tahun 2021 adalah sebesar 100% dan capaiannya sebesar 200%. Pada tahun 2020, jumlah permohonan eksekusi adalah 0 perkara dan jumlah eksekusi adalah 0 perkara, begitu juga pada tahun 2019, jumlah permohonan eksekusi dan jumlah eksekusi sama-sama 0 perkara. Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Padang Panjang, jumlah permohonan eksekusi adalah 2 perkara dan yang eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti sebanyak 1 perkara dan 1 perkara telah dicabut oleh para pihak, sehingga realisasinya menjadi 100%.

Analisa, Hal ini menunjukkan bahwa kinerja untuk indikator ini berupa Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada Pengadilan Negeri Padang Panjang selama tahun 2021 sudah sangat baik.

B. Realisasi Anggaran

Ukuran realisasi pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja pegawai dan operasional perkantoran adalah dengan membandingkan antara volume terlaksananya layanan belanja pegawai dan operasional perkantoran dengan volume belanja pegawai dan operasional perkantoran yang harus dilaksanakan. Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Padang panjang menargetkan untuk volume belanja pegawai 97% (sembilan puluh tujuh persen). Untuk belanja operasional perkantoran adalah 96% (sembilan puluh enam persen, serta belanja modal 99% (sembilan puluh sembilan persen).

Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Padang Panjang mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp. 4.273.641.000,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.196.478.254,- (empat milyar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) dengan persentase total alokasi 98.19% (sembilan puluh delapan koma sembilan belas persen), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut

1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

Anggaran DIPA 01 sebesar Rp. 4.225.925.000,- (empat milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) , yang meliputi:

a. Belanja Pegawai

Meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji, tunjangan dan honorarium sebesar Rp. 2.803.848.000,- (dua milyar delapan ratus tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

b. Belanja Barang

Meliputi pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan sebesar Rp. 1.109.557.000,- (satu milyar seratus sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

c. Belanja Modal

Belanja modal sebesar Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Tabel 3.50 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2021

NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	SISA
1	Belanja Pegawai	2.803.848.000	2.775.548.276	98.99	28.299.724
2	Belanja Barang	1.109.577.000	1.060.794.048	95.60	48.782.952
3	Belanja Modal	312.500.000	312.500.000	100	0
Jumlah		4.225.925.000	4.148.842.324	98.18	77.082.676

Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.51 Rincian Pelaksanaan Belanja Pegawai Tahun 2021

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi		Sisa	
			Rp.	%	Rp.	%
	BELANJA PEGAWAI					
005.01.01.1066.994.001	Gaji dan Tunjangan	2.803.848.000	2.775.548.276	98.04	76.452.676	1.96
005.01.01.1066.994.001. A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan					
005.01.01.1066.994.001. A.511111	Beban Gaji Pokok PNS	1.253.753.000	1.242.066.660	99.07	11.686.340	0.93
005.01.01.1066.994.001. A.511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	19.000	17.489	92.05	1.511	7.95
005.01.01.1066.994.001. A.511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	88.345.000	87.058.700	98.54	1.286.300	1.46
005.01.01.1066.994.001. A.511122	Beban Tunj. Anak PNS	29.899.000	28.771.050	96.23	1.127.950	3.77
005.01.01.1066.994.001. A.511123	Beban Tunj. Struktural PNS	36.450.000	35.700.000	97.94	750.000	2.06
005.01.01.1066.994.001. A.511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	997.680.000	994.260.000	99.66	3.420.000	0.34
005.01.01.1066.994.001. A.511125	Beban Tunj. PPh PNS	97.178.000	97.055.317	99.87	122.683	0.13
005.01.01.1066.994.001. A.511126	Beban Tunj. Beras PNS	73.117.000	71.913.060	98.35	1.203.940	1.65
005.01.01.1066.994.001. A.511129	Beban Uang Makan PNS	217.527.000	209.036.000	96.10	8.491.000	3.90
005.01.01.1066.994.001. A.511151	Beban Tunjangan Umum PNS	9.880.000	9.670.000	97.87	210.000	2.13

Tabel 3.52 Rincian Pelaksanaan Belanja Barang Operasional Tahun 2021

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi		Sisa	
			Rp.	%	Rp.	%
	BELANJA BARANG OPERASIONAL					
005.01.01.1066.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.104.577.000	1.056.424.048	95.64	48.152.952	4.36
005.01.01.1066.994.002. A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN					
005.01.01.1066.994.002. A.521111	Beban Keperluan Perkantoran	218.630.000	212.919.000	97.39	5.711.000	2.61
005.01.01.1066.994.002. A.521119	Belanja barang operasional lainnya	18.425.000	15.436.000	83.78	2.989.000	16.22
005.01.01.1066.994.002. A.521811	Belanja barang persediaan barang konsumsi	60.000.000	59.997.800	100	2.200	0
005.01.01.1066.994.002. B	LANGGANAN DAYA DAN JASA					
005.01.01.1066.994.002. B.521111	Beban Keperluan Perkantoran	173.000.000	171.470.655	99.12	1.529.345	0.88
005.01.01.1066.994.002. B.521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12.000.000	10.647.480	88.73	1.352.520	11.27
005.01.01.1066.994.002. B.522111	Beban Langganan Listrik	57.600.000	47.364.195	82.23	10.235.805	17.77
005.01.01.1066.994.002. B.522112	Beban Langganan Telepon	4.800.000	637.373	13.28	4.162.627	86.72
005.01.01.1066.994.002. B.522113	Beban Langganan Air	12.000.000	7.151.650	59.60	4.848.350	40.40
005.01.01.1066.994.002. C	PEMELIHARAAN KANTOR					
005.01.01.1066.994.002. C.523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	168.800.000	168.772.700	99.98	27.300	0.02
005.01.01.1066.994.002. C.523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	77.000.000	76.879.700	99.98	120.300	0.16
005.01.01.1066.994.002. C.523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	128.040.000	120.249.895	93.92	7.790.105	6.08
005.01.01.1066.994.002. D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR					
005.01.01.1066.994.002. D.521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	49.800.000	49.800.000	100	0	0
005.01.01.1066.994.002. D.521119	Beban Barang Operasional Lainnya	32.322.000	31.976.800	98.93	345.200	1.07
005.01.01.1066.994.002. E	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN					
005.01.01.1066.994.002. F.521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1.260.000	1.050.000	83.33	210.000	16.67
005.01.01.1066.994.002. F	RAPAT KOORDINASI INTERNAL					
005.01.01.1066.994.002. G.521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	840.000	0	0	840.000	100
005.01.01.1066.994.002. H	KOORDINASI					
005.01.01.1066.994.002. H.524111	Belanja Perjalanan Biasa	64.320.000	56.360.000	87.62	7.960.000	12.38
005.01.01.1066.994.002. I	PENANGGULANGAN COVID-19					
005.01.01.1066.994.002. I.521131	Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid – 19	25.740.000	25.710.800	99.89	29.200	0.11

	LAYANAN UMUM					
005.01.01.1066.994.003.A	PENANGANAN COVID-19 NON OPERASIONAL					
005.01.01.1066.994.003.A.521241	Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19	5.000.000	4.370.000	87.40	630.000	12.60

Tabel 3.53 Rincian Pelaksanaan Belanja Modal Tahun 2021

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi		Sisa	
			Rp.	%	Rp.	%
	BELANJA MODAL					
005.01.02.1071.951.001 052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi					
005.01.02.1071.951.001 052.532111	Belanja Modal peralatan dan mesin	312.500.000	312.500.000	100	0	0

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Anggaran DIPA 03 berupa belanja barang Rp. 47.716.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah), ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan.

Tabel 3.54 Realisasi Anggaran belanja DIPA (03) Badan Peradilan Umum

NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	SISA
1	Belanja Barang	47.716.000	47.635.930	99.83	80.070

untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.55 Rincian Pelaksanaan Anggaran Badilum Tahun 2021

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi		Sisa	
			Rp.	%	Rp.	%
	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL					
005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	47.716.000	47.635.930	99.83	80.070	0.17
005.03.07.1049.003	Pos Bantuan Hukum	19.200.000	19.200.000	100	0	0
005.03.07.1049.003.051.A	Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum					
005.03.07.1049.003.051.A.522131	Beban Jasa Konsultan	19.200.000	19.200.000	100	0	0
005.03.07.1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	28.516.000	28.435.930	99.72	80.070	0.28

005.03.07.1049.005.051	PENDAFTARAN BERKAS PERKARA					
005.03.07.1049.005.051. A.521211	Beban Bahan	10.000	0	0	10.000	100
005.03.07.1049.005.051. A.521811	Belanja barang persediaan barang konsumsi	10.556.000	10.551.500	99.96	4.500	0.04
005.03.07.1049.005.052	PENETAPAN HARI SIDANG					
005.03.07.1049.005.052. A.524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.040.000	5.040.000	100	0	0
005.03.07.1049.005.053	PEMERIKSAAN DISIDANG PENGADILAN					
005.03.07.1049.005.053. A.521211	Beban Bahan	10.000	0	0	10.000	100
005.03.07.1049.005.053. A.524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	280.000	280.000	100	0	0
005.03.07.1049.005.054	MINUTASI/UPAYA HUKUM					
005.03.07.1049.005.054. A.521211	Belanja Bahan	820.000	789.430	96.27	30.570	3.73
005.03.07.1049.005.055	PENGIRIMAN PETIKAN/SALINAN PUTUSAN KEPADA JPU DAN TERDAKWA					
005.03.07.1049.005.055. A.521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.000	0	0	5.000	100
005.03.07.1049.005.055. A.524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.600.000	5.600.000	100	0	0
005.03.07.1049.005.056	PENGIRIMAN SURAT PENAHHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHHANAN					
005.03.07.1049.005.056. A.521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.000	0	0	5.000	100
005.03.07.1049.005.056. A.524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.550.000	4.550.000	100	0	0
005.03.07.1049.005.057	PENANGANAN PERKARA BANDING DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA					
005.03.07.1049.005.057. A.521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	95.000	85.000	89.47	10.000	10.53
005.03.07.1049.005.057. A.524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.050.000	1.050.000	100	0	0
005.03.07.1049.005.058	PENANGANAN PERKARA KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI					
005.03.07.1049.005.058. A.521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.000	0	0	5.000	100
005.03.07.1049.005.058. A.524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	490.000	490.000	100	0	0

Grafik 17. Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2021



Semua Program dan Kegiatan telah memberikan kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Negeri Padang Panjang. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian Visi dan Misi, dimulai dengan menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat, selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang dapat meningkat.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang ditetapkan pada tahun 2021, meskipun dalam kenyataan dari sasaran yang ditetapkan tersebut belum dapat diwujudkan secara keseluruhan, dikarenakan indikator kinerja (*outcome*) belum secara tegas mendefinisikan indikator kinerja (*outcome*) untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat.
2. Pada LKjIP Pengadilan Negeri Padang Panjang tahun 2021 ini menyampaikan terjadinya revaluasi Indikator Kinerja Utama yang disinergikan dengan revaluasi Renstra Pengadilan Negeri Padang Panjang tahun 2020-2024 dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Nomor 53 tahun 2015 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Dengan analisis capaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan seperti yang telah diuraikan pada Bab diatas, dan dengan gambaran capaian sasaran kinerja diharapkan dapat dijadikan rujukan dan renungan pada masa yang akan datang untuk memperbaiki susunan program dan sasaran yang dicapai. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi yang akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, terstruktur dan terprogram secara komprehensif.

4. Unsur kemandirian maupun kinerja disadari dengan peningkatan kinerja yang akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Padang Panjang, oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai *user*) adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan dibidang hukum dan peradilan yang profesional, efektif, murah dan mandiri serta tidak adanya intervensi atau pengaruh dari lembaga tinggi lainnya sehingga terwujud *good governance*.
5. Pengadilan Negeri Padang Panjang mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen teknis, administrasi organisasi dan finansial di bawah pembinaan Pengadilan Tinggi Padang dan bertekad untuk secara bertahap dapat dirasakan adanya perbaikan dan peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan. Sangat disadari bahwa peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan tersebut belum mampu memenuhi tuntutan dari berbagai pihak, antara lain, masyarakat pencari keadilan yang mengharapkan adanya pelayanan dibidang peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih. Peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang.
6. Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi Pengadilan Negeri Padang Panjang, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implemtasi : Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) dimasa yang akan datang.

B. REKOMENDASI

Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan tentunya terdapat juga pembelajaran yang berharga bagi pelaksanaannya. Hal tersebut juga menjadi bagian yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta perbaikan-perbaikan

dalam rangka pencapaian misi dan visi Pengadilan Negeri Padang Panjang. Beberapa saran dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih baik dimasa yang akan datang :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang sesuai dengan *core bussines* (ciri khas) dari tugas dan fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan perkara yang diselesaikan tepat waktu.
2. Dalam menetapkan target pada rencana kinerja tahunan harus membandingkan dari data dua tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan tidak terlalu rendah untuk menghindari jika terjadi analisis pengukuran kinerja yang ada capaian kinerja yang melebihi 100%.
3. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), merupakan instrumen objektif yang tidak berpihak. Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai *punish and reward* merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrumental lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.
4. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2020 – 2024.

LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Reviu Indikator Kinerja Utama
3. Matriks Reviu Rencana Strategis 2020-2024
4. Rencana Kinerja Tahun 2021
5. Rencana Kinerja Tahun 2022
6. Rencana Kinerja Tahun 2023
7. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
8. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
9. Rencana Aksi Tahun 2022
10. Dokumen Rapat Penyusunan SAKIP Tahun 2021
11. Penghargaan

LAMPIRAN I
SK TIM PENYUSUN LKJIP 2021



PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
NOMOR W3.U10/ 110 /KOT/SK/XII/2021
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG KELAS II TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG KELAS II

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pertanggung jawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran, khususnya pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, maka dipandang perlu untuk membuat secara lengkap laporan kinerja instansi pemerintah pada Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk membandingkan perencanaan dan hasil yang telah dicapai selama ini;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut, maka dipandang untuk perlu membentuk Tim Penyusun Laporan LKjIP;
 - c. bahwa pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Padang Panjang Tahun 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan point a, b, dan c tersebut di atas, perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Tentang Penunjukkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Padang Panjang Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana terlampir.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG KELAS II TAHUN 2021**
- Kesatu : Menetapkan susunan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, denganketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaiamna mestinya;

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Padang Panjang
Tanggal 24 Desember 2021
Ketua


DADI SURYANDI, S.H.,M.H
Nip. 19790915 200212 1 005

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang
 Nomor : W3.U10/110/KOT/XII/2021
 Tanggal : 24 Desember 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	DADI SURYANDI, S.H.,M.H NIP. 19790915 200212 1 005	Ketua	Pembina
2	LILI EVELIN, S.H.,M.H NIP. 19800730 200312 2 001	Wakil Ketua	Pengarah
3	YUSRITA, S.H NIP. 19660613 199203 2 003	Panitera	Ketua
4	SUIKHSAN ARSELAN, S.E.,S.H NIP. 19770526 200212 1 006	Sekretaris	Wakil Ketua
5	NOFRIZAL NIP. 19680806 199303 1 006	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Sekretaris
6	MAIZA MUKHLIS, S.H NIP. 19640508 198603 2 003	Panitera Muda Perdata	Anggota
7	ARISQI GUSMALAYANTI, S.H NIP. 19830811 2008052001	Panitera Muda Pidana	Anggota
8	ADE ZOLA REZKI, S.H. NIP. 19840723 200904 2 004	Panitera Muda Hukum	Anggota
9	EFRI ROZA, S.Kom NIP. 19790501 200904 1 002	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
10	HARDI NIKO PASMANA, S.H NIP. 19771006 200912 1 001	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Anggota
11	SURYA DHARMA, S.H NIP. 19851130 201212 1 001	Analisis Perencanaan	Anggota



ditetapkan di Padang Panjang
 tanggal 24 Desember 2021
 k a

DADI SURYANDI, S.H.,M.H
 Nip. 19790915 200212 1 005

LAMPIRAN II

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan : - Perdata - Pidana	Jumlah Sisa Perkara yang Diselesaikan _____ 100% Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan Catatan : - Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan - Sisa perkara yang diselesaikan = Sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu : - Perdata - Pidana	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu _____ 100% Jumlah Perkara yang Diselesaikan Catatan : - Jumlah perkara yang harus diselesaikan = Jumlah perkara tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. - Penyelesaian perkara tepat waktu = Perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum _____ 100% Jumlah Perkara Diputus Catatan : - Upaya hukum = banding, kasasi, dan PK - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi _____ 100% Jumlah Perkara Pidana Anak Catatan : Diversi adalah anak pelaku kejahatan tidak dianggap pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	Indek Kepuasan Pencari Keadilan _____ Catatan : - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu :	Jumlah Salinan Putusan yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu _____ 100% Jumlah Perkara Perdata yang Diputus Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

		- Perdata - Pidana	• SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan		Tahunan
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah perkara diPutus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\%$ Catatan : • Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat = putusan perkara tipikor	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}} \times 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

LAMPIRAN III
MATRIKS REVIU RENSTRA 2020 - 2024

MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri Padang Panjang
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Padang Panjang Yang Agung
 Misi :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

NO	TUJUAN		Target jangka menengah (5 tahun)	SASARAN		TARGET				
	Uraian	Indikator Kinerja		URAIAN	INDIKATORKINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100 %	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100 %		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	80 %		c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
		d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	80 %		d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	80 %	80 %	100 %	100 %	100 %
		e. Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	70 %		e. Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
		f. Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	60 %		f. Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	60 %	60 %	80 %	80 %	80 %
		g. Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	60 %		g. Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	60 %	60 %	90 %	90 %	90 %
		h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	20 %		h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	50 %	50 %	20 %	20 %	20 %
		i. Index kepuasan pencari peradilan	80 %		i. Index kepuasan pencari peradilan	80 %	80 %	90 %	90 %	90 %

2	Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan	a. Persentase salinan putusan perdata yang dikirim kepada para pihak pihak tepat waktu	100 %	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perdata yang dikirim kepada para pihak pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase salinan putusan pidana yang dikirim kepada para pihak pihak tepat waktu	100 %		b. Persentase salinan putusan pidana yang dikirim kepada para pihak pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30 %	30 %	20 %	20 %	20 %
		d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %		d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	90 %		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Keterjangkauan pelayanan badan peradilan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0 %		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Kepercayaan Publik	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %

LAMPIRAN IV
RENCANA KINERJA TAHUN 2021

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021

Pengadilan Negeri Padang Panjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	80%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	60%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	60%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	30%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%

LAMPIRAN V
RENCANA KINERJA TAHUN 2022

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Pengadilan Negeri Padang Panjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%

LAMPIRAN VI
RENCANA KINERJA TAHUN 2023

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

Pengadilan Negeri Padang Panjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%

LAMPIRAN VII
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Pengadilan Negeri Padang Panjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	80%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	60%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	60%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	30%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat	100%

		Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 3.771.219.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 312.500.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 47.716.000,-

LAMPIRAN VIII
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Pengadilan Negeri Padang Panjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat	100%

		Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	
4	Meningkatnya Ketaatan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 4.050.066.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 64.000.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 49.216.000,-

LAMPIRAN IX
RENCANA AKSI TAHUN 2022

**RENCANA AKSI
PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
TAHUN 2022**

No	Program Utama	Kegiatan	Target	Anggaran	Sumber Dana	Penanggung Jawab	Bulan												Ket
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	2	3	4	5	6														
A.	MANAJEMEN PERADILAN																		
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	-	-	KPN	X			X				X				X	
		Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	-	-	KPN	X			X				X				X	
		Mengupayakan penyelesaian perkara perdata secara tepat waktu	80%	-	-	Hakim	X			X				X				X	
		Mengupayakan penyelesaian perkara pidana secara tepat waktu	100%	28.516.000	DIPA	Hakim	X			X				X				X	
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	70%	-	-	Hakim	X			X				X				X	
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	80%	-	-	Hakim	X			X				X				X	
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	90%	-	-	Hakim	X			X				X				X	
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	20%	-	-	Hakim	X			X				X				X	
		Index Kepuasan pencari keadilan	90%	-	-	Sekretaris	X			X				X				X	
	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	-	-	Panitera	X			X				X				X	

		Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	5.050.000	DIPA	Panitera	X			X				X				X	
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	-		Hakim	X			X				X				X	
		Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	3.291.000	DIPA	Panitera	X			X				X				X	
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	-		Panitera	X			X				X				X	
	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	-		Hakim	-			-				-				-	
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	0%	-		Hakim	-			-				-				-	
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	19.200.000	DIPA	Panitera	X			X				X				X	
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	-	DIPA	Panitera	X			-				-				-	
	DUKUNGAN MANAJEMEN PERADILAN																		
	Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran	Persentase data pegawai teknis dan non teknis yang terinput dalam aplikasi SIKEP	100%	-		Sekretaris	X			X				X				X	
		Persentase satker yang menyusun RKAKL sesuai akun	100%	-		Sekretaris	X												
		Persentase penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu	100%	-		Sekretaris	X			X				X				X	
		Persentase realisasi capaian output dalam DIPA	100%	-		Sekretaris	X			X				X				X	
		Persentase penyusunan LKjIP tepat waktu	100%	-		Sekretaris	X												
		Persentase BMN yang terinput dalam aplikasi SIMAK BMN	100%	-		Sekretaris	X			X				X				X	
	Pelaksanaan urusan keuangan	Memproses SPM Gaji dan Uang Makan	100%	2.683.464.000	DIPA	PPK	X			X				X				X	
		Memproses permintaan remunerasi	100%	-		Kasub Umum dan Keuangan	X			X				X				X	
		Melaksanakan belanja kebutuhan sehari-hari perkantoran	100%	378.402.000	DIPA	PPK	X			X				X				X	

		Melaksanakan belanja langganan daya dan jasa	100%	260.000.000	DIPA	PPK	X			X				X				X	
		Melaksanakan pemeliharaan kantor	100%	491.340.000	DIPA	PPK	X			X				X				X	
		Melaksanakan pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor	100%	67.820.000	DIPA	PPK	X			X				X				X	
		Terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan	100%	2.040.000	DIPA	PPK	X							X					
		Terlaksananya rapat koordinasi internal	100%	2.040.000	DIPA	PPK	X			X				X				X	
		Melaksanakan koordinasi ke pusat/ tingkat banding/korwil	100%	78.600.000	DIPA	PPK	X			X				X				X	
		Melaksanakan konsultasi ke KPPN/kanwil djpb/kpnkl	100%	34.700.000	DIPA	PPK	X			X								X	
		Terlaksananya penanggulangan Covid-19	100%	15.740.000	DIPA	PPK	X			X				X				X	
	Pelaksanaan urusan kepegawaian	Mengusulkan kenaikan pangkat regular	100%	-	-	Kasub Kepeg				X									
		Mengusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	100%	-	-	Kasub Kepeg				X									
		Mengusulkan Karpeg, Karsu / Karis, BPJS dan Taspen	100%	-	-	Kasub Kepeg	X			X				X				X	
		Mengusulkan promosi dan mutasi jabatan	100%	-	-	Kasub Kepeg	X			X				X				X	
		Memproses SPMT, SPMJ, KP4	100%	-	-	Kasub Kepeg	X			X				X				X	
		Memproses nota usul pensiun	100%	-	-	Kasub Kepeg													Waktu disesuaikan
		Memproses berkas kenaikan gaji berkala	100%	-	-	Kasub Kepeg													
		Memproses berkas usul pemberian penghargaan	100%	-	-	Kasub Kepeg	X												
		Memproses nilai SKP	100%	-	-	Kasub Kepeg												X	
		Memproses surat izin cuti	100%	-	-	Kasub Kepeg	X			X				X				X	
	Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana	Mengelola laporan pelaksanaan anggaran	100%	-	-	Kasub PTIP	X			X				X				X	
		Mengkoordinir pelaksanaan penyusunan anggaran	100%	-	-	Kasub PTIP												X	
	Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip,	Memproses surat masuk	100%	-	-	Kasub Umum dan Keuangan	X			X				X				X	

perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan	Memproses surat keluar	100%	-	-	Kasub Umum dan keuangan	X			X				X				X	
	Melaksanakan system akuntansi barang milik Negara	100%	-	-	Kasub Umum dan Keuangan	X			X				X				X	
	Mengelola buku perpustakaan	100%	-	-	Kasub Umum dan Keuangan	X			X				X				X	
	Menertibkan izin penghunian rumah dinas jabatan	100%	-	-	Kasub Umum Dan Keuangan	X			X				X				X	
Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dilingkungan kesekretariatan Pengadilan Negeri Padang Panjang	Mengelola laporan SAIBA dan BMN	100%	-	-	Kasub Umum dan Keuangan	X											X	
	Mengelola laporan CALK	100%	-	-	Kasub PTIP	X											X	
	Mengelola laporan pertanggungjawaban keuangan bendahara	100%	-	-	Kasub Umum dan Keuangan	X			X				X				X	

LAMPIRAN X
DOKUMEN RAPAT PENYUSUNAN SAKIP 2021



PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
Jalan Soekarno Hatta Nomor 07 Padang Panjang

Telp. 0751-82208 Fax. 0752-82208

Website : www.pn-padangpanjang.go.id Email : pnpp_kls2@yahoo.co.id

Padang Panjang, 12 Januari 2022

Hal : Undangan Rapat Tim Penyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021

Kepada Yth. Bapak/Ibu :
Sekretaris, Para Panmud dan Kasubbag
Dan staf Pengadilan Negeri Padang Panjang

Di
Tempat

Sehubungan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang No. W3.U10/110/KOT/SK/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021, bersama ini kami harapkan kehadirannya untuk dapat mengikuti rapat Tim Penyusun LkjiP Tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Januari 2022
Waktu : 09.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Negeri Padang Panjang

Demikianlah disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Penyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah


YUSRITA, S.H.
NIP. 196606131992032003



PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
Jalan Soekarno Hatta Nomor 07 Padang Panjang

Telp. 0751-82208 Fax. 0752-82208

Website : www.pn-padangpanjang.go.id Email : pnpp_kls2@yahoo.co.id

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Januari 2022
Pukul : 09.30 WIB – Selesai
Kegiatan : Rapat Tim Penyusun LKjIP

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	YUSRITA,S.H.	Panitera	Ketua	
2.	SUIKHSAN ARSELAN, S.E.,S.H.	Sekretaris	Wakil Ketua	
3.	NOFRIZAL	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Sekretaris	
4.	MAIZA MUKHLIS, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota	
5.	ARISQI GUMALAYANTI, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota	
6.	ADE ZOLA REZKI, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota	
7.	EFRI ROZA, S.Kom.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	
8.	HARDI NIKO PASMANA,S.H.	Kasubbag Kepegawaian, Ortala	Anggota	
10.	SURYA DHARMA, S.H	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota	

Pembina

DADI SURYANDI, S.H., M.H.

**NOTULEN RAPAT TIM PERUMUS PROGRAM KERJA TAHUN 2022
PADA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG**

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Kamis / 13 Januari 2022
Pukul : 09.30 WIB - selesai
Tempat : Ruang Media Centre Pengadilan Negeri Padang Panjang
Pembahasan : Rapat Tim Penyusun LkJP Tahun 2021
Pemimpin Rapat : Yusrita, S.H. (Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang)
Notulis Rapat : Surya Dharma, S.H (Analisis Perencanaan Anggaran)
Peserta Rapat : Sekretaris, Para Panmud dan Kasubbag, Dan staf Pengadilan Negeri Padang Panjang

I. Pembukaan

Rapat Tim Penyusun LkJP Tahun 2022 dibuka dan dipandu oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang selaku Ketua Tim Penyusun sesuai dengan SK dari Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang No.W3.U10/110/KOT/SK/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJP) Pengadilan Negeri Padang Panjang Tahun 2021.

II. Pembahasan dari Ketua Tim Penyusun LKJP Tahun 2021

- Rapat ini dilaksanakan berdasarkan SK dari Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang No. W3.U10/110/KOT/SK/XII/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJP) Pengadilan Negeri Padang Panjang Tahun 2021.
- Ketua Tim menyampaikan hal-hal yang perlu dilengkapi dalam penyusunan LKJP Tahun 2021 terutama dari bagian kepaniteraan.
- Kepada masing-masing Panitera Muda dan Kasubbag agar segera mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan LKJP Tahun 2021.
- Para Panitera Muda dan Kasubbag menyerahkan data tersebut kepada tim penyusun.

III. Pendapat dari Wakil Ketua Tim Penyusun LKJP Tahun 2021

- Agar segera mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan LKJP Tahun 2021.
- Agar memperhatikan jadwal penyampaian Laporan LKJP Tahun 2021.

IV. Pendapat dari Anggota Tim Penyusun LKjIP Tahun 2021

- Akan segera mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan LKjIP Tahun 2021.

V. Penutup

Rapat Tim Penyusun LKjIP Tahun 2021 ditutup oleh Ketua Tim dan mengucapkan terima kasih kepada para anggota atas kehadirannya.


Pimpinan Rapat
YUSRITA, S.H

Notulis Rapat

SURYA DHARMA, S.H.



PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
Jalan Soekarno Hatta Nomor 07 Padang Panjang

Telp. 0751-82208 Fax. 0752-82208

Website : www.pn-padangpanjang.go.id Email : pnpp_kls2@yahoo.co.id

DOKUMENTASI RAPAT





PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
Jalan Soekarno Hatta Nomor 07 Padang Panjang

Telp. 0751-82208 Fax. 0752-82208

Website : www.pn-padangpanjang.go.id Email : pnpp_kls2@yahoo.co.id

Padang Panjang, 25 Januari 2022

Hal : Undangan Rapat Penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021

Kepada Yth. Bapak/Ibu :
Ketua, Wakil Ketua, Para Hakim, Sekretaris, Para Panmud
Kasubbag, staf dan PPNPN Pengadilan Negeri Padang Panjang

Di
Tempat

Sehubungan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang No. W3.U10/110/KOT/SK/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Penunjukkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021, bersama ini kami harapkan kehadirannya untuk dapat mengikuti rapat Penyusunan LKjIP Tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 26 Januari 2022
Waktu : 14.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Padang Panjang

Demikianlah disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Penyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah


YUSRJITA, S.H.
NIP.196606131992032003



PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

Jalan Soekarno Hatta Nomor 07 Padang Panjang

Telp. 0751-82208 Fax. 0752-82208

Website : www.pn-padangpanjang.go.id Email : pnpp_kls2@yahoo.co.id

DAFTAR HADIR

Hari : RABU
Tanggal : 26 JANUARI 2022
Pukul : 14.30 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1.	DADI SURYANDI, S.H., M.H.	Ketua		
2.	LILI EVELIN, S.H., M.H.	Wakil Ketua		
3.	PRAMA WIDIA NUGRAHA, S.H., M.H.	Hakim		
4.	FADILLA KURNIA PUTRI, S.H.	Hakim		
5.	GUSTIA WULANDARI, S.H.	Hakim		
6.	SARTIKA DEWI HAPSARI, S.H., M. Kn.	Hakim		
7.	YUSRITA, S.H.	Panitera		
8.	SUIKHSAN ARSELAN, S.E., S.H.	Sekretaris		
9.	MAIZA MUKHLIS, S.H.	Panitera Muda Perdata		
10.	ARISQI GUSMALAYANTI, S.H.	Panitera Muda Pidana		



PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

Jalan Soekarno Hatta Nomor 07 Padang Panjang

Telp. 0751-82208 Fax. 0752-82208

Website : www.pn-padangpanjang.go.id Email : pnpp_kls2@yahoo.co.id

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
11.	ADE ZOLA REZKI, S.H.	Panitera Muda Hukum		
12.	EFRI ROZA, S. Kom.	Kasubbag Umum dan Keuangan		
13.	HARDI NIKO PASMANA, S.H.	Kasubbag Kepegawaian, Ortala		
14.	NOFRIZAL	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan		
15.	ZARNELIS	Panitera Pengganti		
16.	JENI EFENDI	Panitera Pengganti		
17.	NILA HAYATI	Panitera Pengganti		
18.	JUNAIDI HENDRI, S.H.	Jurusita		
19.	PERHIMPUNAN NASUTION	Jurusita Pengganti		
20.	SURYA DHARMA, S.H.	Analisis Perencanaan - Sub Bagian PTIP		
21.	WAHYUDIANTO	Jurusita Pengganti		
22.	HENDRA PARNANDE	Bendahara pada Sub Bagian Umum Dan Keuangan		



PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

Jalan Soekarno Hatta Nomor 07 Padang Panjang

Telp. 0751-82208 Fax. 0752-82208

Website : www.pn-padangpanjang.go.id Email : pnpp_kls2@yahoo.co.id

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
23.	NANDA FERNANDO, S. Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama – CPNS		
24.	AHMI FAJARSARI FEBRINA SYADZA, A. Md.	Arsiparis – Pelaksana/Terampil - CPNS		
25.	WILSON	PPNPN		
26.	DONI ROBIANTO	PPNPN		
27.	SUHAR WANCE	PPNPN		
28.	EDWAR SAPUTRA	PPNPN		
29.	ULUL AZMI	PPNPN		
30.	YURMA ELSY	PPNPN		
31.	ARI GOVINDA	PPNPN		
32.	ZIKRULLAH	PPNPN		

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang



DADI SURYANDI, S.H., M.H.
NIP.19790915 200212 1 005

Petugas Absensi,



HARDI NIKO PASMANA, S. H.
NIP.19771009 200912 1 001

**NOTULEN RAPAT TIM PERUMUS PROGRAM KERJA TAHUN 2022
PADA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG**

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Rabu / 26 Januari 2022
Pukul : 14.30 WIB - selesai
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Padang Panjang
Pembahasan : Rapat Penyusunan LkJP Tahun 2021
Pemimpin Rapat : Yusrita, S.H. (Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang)
Notulis Rapat : Surya Dharma, S.H (Analisis Perencanaan Anggaran)
Peserta Rapat : Ketua, Para Hakim, Sekretaris, Para Panmud dan Kasubbag, staf dan PPNPN Pengadilan Negeri Padang Panjang

I. Pembukaan

Rapat Penyusunan LKJP Tahun 2021 dibuka dan dipandu oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang selaku Ketua Tim Penyusun sesuai dengan SK dari Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang No.W3.U10/110/KOT/SK/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJP) Pengadilan Negeri Padang Panjang Tahun 2021.

II. Pembahasan dari Ketua Tim Penyusun LKJP Tahun 2021

- Rapat ini dilaksanakan berdasarkan SK dari Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang No. W3.U10/110/KOT/SK/XII/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJP) Pengadilan Negeri Padang Panjang Tahun 2021.
- Ketua Tim menyampaikan hal-hal yang perlu dilengkapi dalam penyusunan LKJP Tahun 2021 terutama dari bagian kepaniteraan.
- Ketua Tim menyampaikan serta membahas mengenai target perjanjian kinerja tahun 2022.
- Ketua Tim menyampaikan bahwa penyusunan LKJP 2021 dalam proses.
- Menyampaikan bahwa SAKIP Tahun 2021 terdiri dari Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja, Reviu IKU, Reviu Renstra, Rencana Aksi dan dokumen LKJP Tahun 2021.

III. Pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang.

- Membahas mengenai penyusunan LKJP Tahun 2021.
- Membahas mengenai target perjanjian kinerja tahun 2022 serta membahas mengenai Reviu Renstra 2020 – 2024.
- Agar memperhatikan jadwal penyampaian Laporan LKJP Tahun 2021.

- IV. Pendapat dari Peserta Rapat Penyusunan LKjIP Tahun 2021
- Cukup

V. Penutup

Rapat Penyusunan LKjIP Tahun 2021 ditutup oleh Ketua Tim dan mengucapkan terima kasih kepada para peserta rapat atas kehadirannya.



Notulis Rapat



SURYA DHARMA, S.H.



PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
Jalan Soekarno Hatta Nomor 07 Padang Panjang
Telp. 0751-82208 Fax. 0752-82208
Website : www.pn-padangpanjang.go.id Email : pnpp_kls2@yahoo.co.id

DOKUMENTASI RAPAT



LAMPIRAN XI

PENGHARGAAN PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

PENGHARGAAN PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

A. Keberhasilan Memperoleh “A” (Excellent) Akreditasi Penjaminan Mutu



B. Penghargaan sebagai Pengadilan Terbaik Peringkat III dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Semester I Tahun 2021 dari KPPN Bukittinggi



C. Penghargaan sebagai Pengadilan Terbaik Peringkat II dalam Penyelesaian Pendaftaran User SAKTI Tahun 2021 dari KPPN Bukittinggi

